© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROBABILITI PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

ARIANA ADESI
06951012

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama	: ARIANA ADESI
No. BP	: 06951012
Jenjang Pendidikan	: S1 (Strata Satu)
Jurusan	: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Probabiliti Penduduk Miskin Di Kabupaten Dharmasraya

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Januari 2011
Pembimbing

Prof.Dr.Nasri Bachtiar, SE.MS
NIP. 195909121987021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi	Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi,SE,MA	**Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing**
NIP.195410091980121001	**NIP.130 812 952**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

"ayah (Rahmansyah) dan ibu (Anem Aswati)Tercinta"

untuk setiap untaian doa,

nasehat, dan keringatmu yang mengiringi setiap lankahku

yang mengantarkan ku pada titik ini.

"Disaat kita terpuruk, yang tidak boleh mati adalah harapan"

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

karena itu apabila telah selesai tugas, kerjakanlah yang lain

dengan sungguh-sungguh,

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"

(Q S Assy-Syarh : 6-8)

Bertemanlah dengan orang yang suka membela kebenaran

Dialah hiasan dikala kita senang dan perisai diwaktu kita susah

Namun kita tidak akan pernah memiliki seorang teman jika kita mengharapkan seseorang

tanpa kesalahan

Karena semua manusia itu baik kalau kita bisa melihat kebaikannya dan menyenangkan kalau

kita bisa melihat keunikannya

Tapi semua manusia itu akan buruk dan membosankan kalau kita tidak bisa melihat keduanya

No.Alumni Universitas	**Ariana Adesi**	No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tanggal Lahir: Ampang Kuranji/ 05 September 1988 b) Orang Tua: Rahmansyah dan Anem Aswati c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Ilmu Ekonomi e) No. Bp: 06951012 f) Tanggal Lulus: 28 Januari 2011 g) Predikat Lulus: h) IPK: i) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan) Alamat Orang Tua: Jl Cangkir batu No 69, Ampang Kuranji Dharmasraya

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Probabiliti Penduduk Miskin Di Kabupaten Dharmasraya

Skripsi S1 Oleh : Ariana Adesi
Pembimbing : Prof.Dr. Nasri Bachtiar, SE. MS

ABSTRAK

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi yaitu pada tahun 2009 sebanyak 19.87 ribu jiwa penduduk miskin. Kabupaten Dharmasrayapun pada tahun 2009 menduduki nomor urut ke-6 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk persentase penduduk miskin menurut Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Banyak factor-faktor kemungkinan yang menyebabkan kemiskinan. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jumlah angota rumah tangga, etos kerja, status pekerjaan kepala rumah tangga, kredit usaha dan pengaruh probabilitinya terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan temuan impiris dengan analisa regresi logistic diketahui bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga, etos kerja, status pekerjaan kepala rumah tangga, kredit usaha berpeluang signifikan terhadap kondisi kemiskinan, sedangkan jumlah anggota keluarga berhubungan positif tetapi tidak berpeluang signifikan terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Januari 2011, Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji.

Tanda Tangan			
Nama Terang	**Prof. DR. Nasri Bachtiar, SE. MS.** (Pembimbing)	**Feri Andrianus, SE.M.Si** (Penguji 1)	**Yulia Anas, SE.M.Si** (Penguji 2)

Mengetahui :

Ketua Jurusan : **Prof. DR. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA.Ing**
NIP. 130812952 Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama	Tandatangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tandatangan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terima kasih kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya baik itu iman, islam dan kesehatan. Shalawat beriring salam tak lupa penulis ucapkan kepada pimpinan umat yakni Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan semoga kita berada di barisan panjang beliau di Yaumil Akhir nanti, Amin ya Rabbal'Alamin sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul "**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Probabiliti Penduduk Miskin Di Kabupaten Dharmasraya"** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (SE) pada Universitas Andalas.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan tulus dan ikhlas baik berupa dukungan moril maupun materil, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Prof.Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.

3. Prof.Dr. Nasri Bachtiar, SE. MS selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan memberikan nasehat, pengarahan, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Neng Kamarni, SE.M.Si selaku Kepala Program Reguler Mandiri Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Feri Andrianus, Se. M.Si dan Ibu Yulia Anas selaku penguji pada seminar hasil yang telah memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis dan juga memberikan kepercayaan bagi penulis untuk menyandang gelar akademik.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta kepada staf Biro Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi khususnya pak Oyon dan Pak Helmi yang telah banyak membantu kami selama perkuliahan.
7. Kepada keluarga besar penulis (Akura & Barus) yang sangat penulis sayangi, buat Ayah dan Ibu yang selalu memberikan segala hal positif bagi penulis, selalu ada untuk penulis disaat penulis senang maupun sedih, yang mau mengerti dan menerima segala keterbatasan yang penulis miliki, takkan pernah ada habisnya kata-kata terima kasih buat kasih sayang ayah dan ibu buat penulis. Buat adik2ku tercinta Nondut dan Pajun berjuanglah terus meraih impian walaupun jauh dari keluarga, buat etek-etek, mamak- mamak, om-om makasih do'anya, and for all family khusus generasi berikutnya: tanpa kecuali "INGAT dalam keluarga kita jangan ada yang putus sekolah, siapa yang melanggar kakak orang pertama yang akan menyidang kalian", tak harus

menjadi juara tapi berusahalah agar ilmu itu berguna. Special thx for grandma: lihatlah cucumu tgl 26 februari 2011 dari atas sana, miss u T_T.

8. Pak undang yang telah berperan besar dalam skripsi penulis, terimakasih pak atas bantuannya yang sangat berarti bagi penulis.

Teman-teman penulis di jurusan ilmu ekonomi 06 tanpa kecuali diabsen satu2 ya menurut BP haha: Yuli (thx buk support jrk jauhx..hehe), Alin (pasang mental baja lin nemuin pembimbing), mulfi(mksh pit nasehat2 positifx), Yani, Mulk, Nia, Ica,Iqbal (semangat), Ira, P'je(semangat), Andri, Andre (semangat), Iwah (makasih dah cukup mengerti dengan sifat penulis selama ini), Vani, Mona, Riri (lanjutkan Magdalena.:)) Alex cino (semangat), Hilda (ngilang kmn nih g ada kabar) Adib (semangat), Dori (semangat), Eko (moga g sakit2 lg ya) Alex ndut (semangat), Dila si asdos, Ocha (Semangat), Sherli, Yahfiz, Anggi (Semangat), Delvi (mudah-mudahan jadi pindah ke Dharmasraya ya..hehe), El, Andre R (semangat), Devi, Novi(double wisudanya jenk..hihi), Rizky (Semangat), Andres, K'yossi (makasik byk2 kak...terlalu byk sebenarnya hehhe...makasih udah jadi pembimbing 3 di skripsi ria...xix), Randi (semangat), Paskaria (tetap semangat ya sob, makasih dah nemenin kemanapun disaat penulis butuh kesuatu tempat), Imam, Wykel (nama yg sulit buat dibaca, hehe), Een, Inel, Fici (kenangan ngprint berjam2..hhoho), Nova(wisuda bareng si dia semester dpn tuwh...hmm), Rifki (semangat), Nency, Riswandi, Aam (semangat), Dini, Wandi (semangat). Makasih banyak ya teman-teman buat kebersamaannya selama ini, walaupun akhirnya kita semua akan dipisahkan oleh jarak karena memiliki masa depan masing-masing, tapi insyaallah pertemanan kita tak kan berakhir. Tetap semangat kawan..:)

Partai MM (Pra, Meron, Nia, Wika, Temok), makasih banyak bantuan pinjaman laptop, do'a, support serta masukan-masukannya, termasuk sifat gilonyo..hahah. buat Ririn n keluarga yang udah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, makasih buat kehadiran kalian dikehidupan penulis. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini yang disebabkan berbagai hal dan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima dengan segala kerendahan hati, dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 11

1.6 RuangLingkup penelitian 11

1.7 Sistimatika Penulisan 12

BAB II KERANGKA TEORITIS

2.1 Definisi Kemiskinan 13

2.2 Ukuran kemiskinan 18

2.3 Ciri- Ciri Kemiskinan 19

2.4 Penyebab Kemiskinan 21

2.5 Hipotesis 27

2.6 Penelitian Terdahulu 27

2.7 Kerangka Pikir 29

2.7.1 Hubungan tingkat Pendidikan dengan kemiskinan 29

2.7.2 Hubungan jumlah anggota keluarga dengan Kemiskinan 32

2.7.3 Hubungan etos kerja dengan Kemiskinan 34

2.7.4 Hubungan status pekerjaan kepala rumah tangga dengan Kemiskinan 35

2.7.3 Hubungan kredit usaha dengan Kemiskinan 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data 40

3.2 Konsep dan Pengukuran Variabel 40

3.3. Metode Analisis Data 45

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 49

4.1.1 Keadaan Geografis Dharmasraya 49

4.1.2 Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Dharmasraya 50

4.2 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya 53

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Rumah Tangga Miskin Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga 58

5.2 Rumah Tangga Miskin Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga 60

5.3 Rumah Tangga Miskin Menurut Etos Kerja 62

5.4 Rumah Tangga Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga 63

5.5 Rumah Tangga MiskinMenurut Kredit Usaha 65

5.6 Hasil Estimasi 66

5.7 Pembahasan 73

5.8 Implikasi Kebijakan 75

BAB VI PENUTUP

5.1 Kesimpulan 79

5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisis Logistik.....44

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya.....53

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005,2006,2007, 2008 dan 2009.....54

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun keatas Menurut Sektor Bekerja tahun 2005, 2006 dan 2008.....55

Tabel 4.4 Distribusi Persentase Punduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Menurut Pendidikan yang ditamatkan.....56

Tabel 5.1 Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Tahun 2009.....59

Tabel 5.2 Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Ukuran Rumah Tangga Tahun 2009.....61

Tabel 5.3 Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Etos Kerja Tahun 2009.....62

Tabel 5.4 Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Tahun 2009.....64

Tabel 5.5 Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Penerimaan Kredit Usaha Tahun 2009.....65

Tabel 5.6 Hasil Penghitungan Regresi Logistik.....67

DAFTAR GRAFIK

Grafik4.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun2005-2009.....51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pemerintah yang diprioritaskan dalam menyusun strategi pembangunan. Strategi ini merupakan salah satu strategi dari *triple track strategy* pemerintah, yang meliputi penanggulangan masalah kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu isu kemiskinan juga merupakan fokus perhatian pembangunan di hampir semua negara. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang tertulis secara jelas dalam *Millenium Development Goals*-MDGs (World Bank, 2006).

Sejak awal tahun 1970-an, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam strategi pembangunan di Indonesia. Berbagai kebijakan dan upaya pengurangan penduduk miskin pada masa tersebut telah dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Tujuan utama strategi penghapusan kemiskinan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk dan mengurangi kesenjangan social ekonomi/ketimpangan antar golongan penduduk (BPS, 2004).

Dinegara-negara berkembang persoalan ini tidaklah mudah mengatasinya. Berbagai kendala yang dihadapi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi dan lemahnya manajemen pembangunan selalu menjadi hambatan

yang sulit untuk diatasi. Disamping itu kebijakan pembangunan yang di berlakukan di Negara-negara berkembang sering kali juga turut memperlebar jurang kesenjangan produktivitas antar golongan masyarakat, dan antar penduduk laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu pembangunan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Disamping itu, perkembangan penduduk perlu diarahkan pada pegendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Kesejahteraan rakyat biasanya dilihat dari pemerataan kemakmuran. Pemerataan tingkat kemakmuran adalah tujuan pembangunan yang ideal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti tanpa diiringi dengan pemerataan pembangunan. Untuk itu pemerintah diberbagai belahan dunia, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang selalu berusaha semaksimal mungkin mengurangi ketimpangan antar golongan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang berusaha melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah makin menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu agenda tahunan yang harus mendapatkan perhatian utama. Hal ini dibuktikan melalui pemaparan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Januari 2009 yang memasukkan kesejahteraan rakyat sebagai isu strategis. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk

miskin di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar 34,96 juta jiwa (15,4%) sedangkan target pemerintah tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 31 juta jiwa (14%). Pencapaian target ini tertuang dalam rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) 2009 yang bertema "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan" (my base-blogspot.com).

Secara operasional pencapaian target tersebut dilakukan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan sejak tahun 2008. **Klaster pertama**, adalah pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu, melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan OperasionalSekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). **Klaster kedua** dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri). Dan **klaster ketiga** dijalankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni social, ekonomi, budaya, dan politik. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antar daerah bahkan antar negara. Di Negara maju persoalan kemiskinan biasanya lebih ditekankan pada masalah kualitas hidup dan pertumbuhan sector industry, sedangkan di Negara berkembang permasalahan distribusi pendapatan lebih banyak menjadi sorotan (Todaro, 2000).

Menyikapi masalah ini, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan pelaksanaan pembangunan selama ini yang cenderung berkonotasi kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat local, maka menurut Muridan untuk melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman empiris

masyarakat local, perlu dicermati dan dijadikan suatu kajian dalam melihat kebijaksanaan penaggulangan kemiskinan yang ada saat ini (Afkar,1999).

Sebagai alternative lain selain pertumbuhan ekonomi untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keberhasilan pembangunan yang digunakan berbagai angka Indeks. Seperi Indeks Kemiskinan (Poverty Indeks), Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks), Indeks Bagian Distribusi (Distribusi Share Indeks), Indeks Kesetaraan Bobot (equal-weights Indeks), Gini Rasio, dan sebagainya. Ke lima indeks tersebut cukup relevan untuk mengamati kinerja pembangunan dan proses pengentasan kemiskinan sebagai sasaran pokok pembangunan.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan para ahli ekonomi tentang masalah kemiskinan dan factor penyebabnya. Factor penyebab kemiskinan itu diidentifikasi sehingga ditemukan akar permasalahan kemiskinan sebenarnya. Seorang ahli ekonomi mengidentifikasikan pada level terendah yaitu rumah tangga untuk daerah pedesaan di Sumatera Barat. Menurutnya factor penyebab kemiskinan rumah tangga itu saling terkait satu sama lain, namun factor sumber daya manusia merupakan kunci. Factor sumber daya manusia terdiri dari tingkat pendidikan/ keterampilan, tingkat kesehatan, jumlah tanggungan keluarga, sector pekerjaan kepala keluarga dan nilai budaya (Asnawi, 1994).

Berbagai upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan kemiskinan di Indonesia. Setiap program/ kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak sepenuhnya dapat mencapai sasaran mengingat sampai saat ini tidak

jarang terjadi sesuatu kebijaksanaan yang diterapkan berhasil pada suatu tempat tapi kerang berhasil bahkan gagal di tempat lain. Melihat kondisi tersebut maka masalah kemiskinan tidak dapt ditanggulangi secara umum melainkan harus secara khusus, untuk itu masih diperlukan pengkajian lebih spesifik secara berkelanjutan.

Pernyataan di atas juga disampaikan oleh Quibria yang menurutnya program dan kebijaksanaan pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) hanya akan dapat berjalan dan terlaksana secara efektif apabila program dan kebijaksanaan dirancang berdasarkan pengetahuan tentang factor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut. Oleh karena itulah upaya- upaya pengentasan kemiskinan yang telah banyak dilakukan sekarang ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Maka diperlukan pemahaman tentang dimensi dan factor-faktor penyebab kemiskinan itu terjadi (Taifur, 1993).

Demikian juga halnya dengan variabel budaya kerja yang diaplikasikan dengan rata-rata jam kerja. Bagi penduduk yang memiliki rata-rata jam kerja di bawah normal (35 jam per minggu) yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas berusaha akan berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Dengan jam kerja di bawah normal biasanya akan berakibat pada rendahnya produktivitas sehingga variabel budaya kerja ini menjadi salah satu standar penyebab yang dapat membentuk kemiskinan.

BPS menggunakan 14 variabel/kriteria untuk mengkategorikan penduduk miskin yang dijadikan standar kemiskinan. Dimana Standar Kemiskinan versi BPS pada Maret 2007 meliputi (1) Pendapatan, dimana satuan pengkurannya melalui

RP.167.000/bulan/orang atau Rp.5.500/hari/orang. (2) Rumah, pengukurannya Kurang dari 8 m^2; lantai tanah/bambu; dinding bambu/rumbia. (3) Tidak ada jamban/toilet. (4) Penerangan dalam rumah tanpa listrik atau hanya memakai Lampu templok(minyak). (5) Sumber air, satuan pengukurannya Sumur/air hujan. (6) Bahan bakar memasak menggunakan Kayu/minyak tanah. (7) hanya bisa makan 1 atau 2 kali/hari. (8) Mengkonsumsi daging/ayam/susu sebanyak 1 kali/minggu. (9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun. (10) Asupan Kalori 2100/hari (11) Tidak membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. (12) Sumber penghasilan kepala Keluarga rumah tangga: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan dll dengan pendapatan <Rp 600.000. (13) Tidak memiliki tabungan/barangyang mudahdijual denga nilai RP: 500.000 seperti: sepeda motor(kredit/ noncredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. (14) Pendidikan tertinggi kepala keluarga rumah tangga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD. Seseorang akan dikategorikan miskin oleh BPS jika memenuhi minimal 8 dari 14 kriteria/variabel tersebut. BPS (disadur dari Batubara, 2008).

Dalam hal ini, variabel pendidikan menjadi salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan wawasannya sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Dengan rendahnya daya kreativitas masyarakat maka akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup.

Seperti didaerah lain, keadaan ekonomi di Kabupaten Dharmasrayapun penduduknya juga berada dalam situasi lemah. Seorang ahli ekonomi mengatakan :"

Janganlah percaya kepada angka statistic"(Darrel Huff, 2002). Sebab, sekalipun menurut data statistic yang resmi dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat, semua itu mungkin saja " wajah kesejahteraan diatas kertas". Realitas kehidupan masyarakat yang sebenarnya dari tahun ketahun. Dimana Dharmasraya merupakan kabupaten yang sedang membangun dengan masalah kependudukan yang cukup serius dengan tingkat pertumbuhan yang relative tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal suatu Negara, tetapi juga akan merupakan beban pembangunan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi yaitu pada tahun 2009 sebanyak 19.87 ribu jiwa penduduk miskin. Kabupaten Dharmasrayapun pada tahun 2009 menduduki nomor urut ke-6 dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Sumatera barat. Sedangkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indicator dalam mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah daerah dari berbagai lapangan usaha maupun untuk melihat karekteristik penyebaran dari perkonomian suatu daerah memperlihatkan bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2007 meningkat sebesar 6,47 persen menjadi 6,54 persen tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan sebesar 6,67 persen tahun 2009.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian di Kabupaten Dharmasraya, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2008 sebesar 11,66 juta rupiah per orang per tahun meningkat menjadi 12,59 juta per orang pertahun di tahun 2009. Seharusnya dengan PDRB perkapita yang meningkat,

kesejahteraan masyarakatpun diharapkan akan meningkat dan tingkat kemiskinanpun dapat ditekan.

Walaupun secara umum kita ketahui bahwa kabupaten Dhamasraya dikenal dengan kabupaten penghasil karet dan sawit yang sangat berperan bagi income daerah yang seharusnya mampu mengangkat taraf hidup masyarakat, tapi kenapa disaat pembangunan di Dharmasraya semakin meningkat yang membuat masyarakat dikabupaten ini dikenal memiliki taraf hidup menengah keatas disisi lain masih terdapat masyarakat yang ekonomi menengah kebawah dan masih banyak dalam khasus ini sangat jelas adanya distribusi pendapatan, adanya kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.

Banyak faktor penyebab kemiskinan di Dharmasraya di antaranya pendapatan masyarakat yang masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, etos kerja atau budaya kerja, penguasaan lahan produktif, pendidikan. Selain itu masih ada lagi faktor yang menyebabkan kemiskinan. Faktor banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan kepala keluarga juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Variabel pendapatan ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dimana pendapatan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kesejahteraan keluarga sulit tercapai. Hal ini ditambah berat karena terkadang harga dari komoditi pertanian seperti karet turun jauh dari harga biasanya, mengingat 53.527 jiwa masyarakat Dharmasraya yang memperoleh pendapatan dari pertanian.

Dari uraian latar belakang di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Probabiliti Penduduk Miskin Di Kabupaten Dharmasraya".**

1.1 Rumusan Masalah Penelitian

Berbagai upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan kemiskinan di Indonesia. Setiap program/ kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak sepenuhnya dapat mencapai sasaran mengingat sampai saat ini tidak jarang terjadi sesuatu kebijaksanaan yang diterapkan berhasil pada suatu tempat tapi kurang berhasil bahkan gagal di tempat lain .

Seperti yang kita ketahui, program pemerintah makin ditingkatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri, BLT dll, serta jumlah dana yang disediakan pemerintahpun semakin tinggi agar dapat mendorong terjalannya program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, seperti pada tahun 2007 dana yang dikeluarkan untuk program kemiskinan mencapai 54 Triliun dimana penduduk miskin berjumlah 37,17 juta dan pada tahun 2008 dana ditingkatkan menjadi 63 Triliun, penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 35,3 juta penduduk miskin dan angka inipun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2009 dimana penduduk miskinnya berjumlah 32,53 jiwa. Meskipun telah terjadi penurunan kemiskinan dari tahun 2007 sampai 2009, secara absolute jumlah penduduk miskin masih tinggi (menkokesra.go.id). Melihat kondisi tersebut maka masalah kemiskinan

tidak dapat ditanggulangi secara umum melainkan harus secara khusus, untuk itu masih diperlukan pengkajian lebih spesifik secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Factor- factor apa sajakah yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana pengaruh variabel bebas yang meliputi: tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga rumah tangga, etos kerja, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, dan variabel kredit usaha terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis factor- factor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya.
2. Mendiskripsikan angka kemiskinan Di Kabupaten Dharmasraya
3. Mengkaji implikasi pengaruh variabel bebas yang meliputi: tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga rumah tangga, etos kerja, jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan variable kredit usaha terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai:

1. Selain menambah wawasan, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian yang lebih mendalam.
2. Akan menjadi bahan pertimbangan dan bahan tambahan pengetahuan apabila ingin mempelajari factor-faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Dharmasraya
3. Sebagai acuan bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.
4. Memberikan saran dan implikasi kebijakan dari hasil studi bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat luas dan kompleks, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya mengkaji:

a. Pendidikan kepala rumah tangga dengan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya
b. Jumlah anggota rumah tangga dengan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.
c. Etos kerja dengan kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.
d. Status pekerjaan dengan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
e. Kredit Usaha dengan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan Sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Berisi landasan teori yang menguraikan konsep dan teori-teori para ahli serta yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembahasan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang data dan sumber data, konsep dan pengukuran variable, serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Menggambarkan profil daerah penelitian secara umum yang terdiri dari keadaan wilayah, keadaan penduduk dan kemiskinan.

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilakukan analisis dan pembahasan tentang factor- factor penyebab kemiskinan didaerah penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Untuk merumuskan suatu definisi tentang kemiskinan dari sejumlah pandangan dan pendekatan yang dinamis memang tidak mudah, karena formulasi dari para ahli dan penelitian dipengaruhi oleh fokus kajian masing- masing.

Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Defenisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, pada awal tahun 90-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Belakangan ini pengertian kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (SMERU, 2001).

Sedangkan kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta benda berharga tersebut maka seseorang atau sekelompok orang

kurang mampu membiayai kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya (Suparlan, 1994).

Bila dicermati secara lebih dalam permasalahan mengenai kemiskinan dan penyebabnya akan muncul berbagai dimensi kemiskinan karena kemiskinan itu sendiri multikompleks, yang berkaitan dengan ruang, waktu serta tempat dimana kemiskinan dilihat dari berbagai sudut pandang.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejehtaraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Ketakberdayaan penduduk miskin, menurut Mubyarto (1997), disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Berikut ini merupakan definisi kemiskinan:

1. Bappenas (2005), dalam dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki- laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak- hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan didasarkan atas pendekatan berbasis hak (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005).

2. Konferensi dunia untuk pembangunan sosial telah mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut :

   kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya.

3. Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial , keadaan yang menderita karena sakit,

kurangnya kemampuan dan ketidak berfungsian fisik untk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya berkelanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (*relative deprivation)*.

4. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996: 10)

   Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupu fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Kemiskinan menurut tingkatan

   Kemiskinan adalah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam dan kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina (Aisyah, 2001: 151).

6. Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun didaerah perkotaan.

Kemiskinan Absolute

Selanjutnya orang yang dikatakan miskin absolute apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

nasib dan kepentingan sendiri, pemanfaatan sumberdaya dan punya kekuatan untuk menuntut hak.

2.2 Ukuran kemiskinan

Adapun garis kemiskinan yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Kemiskinan Menurut Pemerintah

   BPS menghitung atas dasar jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) per kapita menetapkan angka kebutuhan minimum bagi makanan 2100 kalori per hari ditambah dengan pengeluaran minimal untuk kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan barang tahan lama. Kebutuhan minimum bukan makanan ini berbeda antara penduduk kota dan penduduk didaerah pedesaan.
2. Menurut world bank (2009, pp. 19), dinyatakan dengan konsep penduduk yang berpenghasilan rata- rata per hari Rp20.600,00. Di Indonesia, perkiraan tentang garis kemiskinan ini ditentukan melalui perhitungan kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar.

Dalam Widodo (1990:24) ukuran kemiskinan (*headcount index)* untuk menentukan tingkat kemiskinan diperoleh dari persamaan:

$$Y = \frac{q}{n} \times 100\%$$

Dimana:

Y= Tingkat kemiskinan

q = Jumlah Penduduk Miskin

n = Jumlah penduduk

Disamping mudah diperhutungkan ukuran ini mempunyai berapa kelemahan sebagai alat pengukur tingkat kemiskinan setiap kali terjadi perubahan tingkat pendapatan dan golongan penduduk miskin tidak akan mengalami perubahan dalam tingkat kemiskinan. Hal ini tentu kurang tepat, kenaikan tingkat pendapatan golongan penduduk miskin walaupun masih berada di bawah garis kemiskinan tentu akan bepengaruh kepada tingkat golongan tersebut.

Nilai HPI (*Human Poverti Index)* menunjukkan proporsi penduduk yang secara luas dipengaruhi oleh hilangnya tiga hal utama (daya hidup, ilmu pengetahuan dan ketetapan ekonomi), angka HPI yang rendah menunjukkan hal yang bagus (yakni, persentase penduduk yang mengalami kehilangan hak yang lebih kecil), sedangkan HPI yang tinggi menunjukkan kehilangan yang lebih besar. Dalam HPI dapat kita lihat bahwa hubungan antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.

2.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Dalam menentukan ciri- ciri kemiskinan terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli, Todaro mengatakan ciri-ciri orang miskin adalah bertempat tinggal di pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian atau yang berhubungan

dengan itu (Todaro,1993). Senada dengan itu (Glewee, 1990) menyebutkan sebahagian besar penduduk miskin berada dipedesaan dan bekerja disektor pertanian atau pekerja sendiri yang sering juga disebut dengan pekerjaan informal.

Seorang ahli ekonomi (prayitno,1987) mengemukakan ciri-ciri penduduk miskin sebagai berikut:

- Umumnya tidak memiliki factor-faktor produksi sendiri seperti tanah, modal dan keterampilan serta pendaptan yang rendah
- Mengalami kesulitan dalam memiliki akses produksi
- Pendidikan umumnya rendah
- Umumnya adalah petani pekerja atau pekerja kasar di sector pertanian

Sementara itu BKKBN (1998) memberikan ciri-ciri kemiskinan dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan berupa: melaksanakna ibadah, makan 2x sehari, pakaian berbeda pada setiap aktivitas, lantai rumah tidak dari tanah, penggunaan saran kesehatan formal, penyediaan daging/ikan atau telur 1x seminggu, luas lantai minimal 8m persegi tiap penghuni, kondisi sehat 3 bulan terakhir, berpenghasilan tetap dan melaksankan KB.

Menurut Asnawi (1994) ciri- ciri keluarga miskin adalah: (1)Pendapatan perkapita keluarga berada di bawah garis kemiskinan.(2)Kurang gizi. (3)Kesehatan yang kurang baik. (4)Tingkat kematian bayi tinggi. (5)Pendidikan tertinggi anak masih rendah. (6) Kualitas perumahan belum memenuhi syarat minimum. (7) Pengeluaran konsumsi pangan masih yang utama dan belum mencukupi.

2.4 Penyebab kemiskinan

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi 2 macam. Pertama adalah cultural, yaitu yang disebabkan oleh adanya factor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bias dihilangkan atau sedikitnya bias dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan kearah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan structural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sisitem atau tatanan social yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain" seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Penyebab kemiskinan menurut Nurske dalam Kuncoro (2000:107) adalah sebagai berikut:

- Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Menganalisa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang komplek. Mulai dari faktor sumberdaya manusianya, kondisi alam dan geografis, kondisi sosial-budaya, sampai kepada sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Kerapkali faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain. Faktor-faktor rendahnya mutu sumberdaya manusia, kondisi alam dan geografis, serta kondisi sosial-budaya berkaitan dengan tingkat keterbelakangan (underdevelopment) suatu masyarakat yang pada dasarnya dapat diperbaiki. Namun ada pula faktor kondisi alam dan geografis yang tidak dapat lagi tertanggulangi sehingga menyebabkan Kemiskinan Absolut yang menetap sifatnya.

Tapi banyak ahli yang lebih meyakini bahwa faktor dominan penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan ekonomi, sosial ataupun politik yang mengakibatkan apa yang disebut Kemiskinan Struktural (Struktural Poverty), baik pada tatanan negara maupun internasional.

Fenomena Kemiskinan Struktural ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bias Kota (*Urban Bias*).

   Pada banyak negara sedang berkembang (*developing countries*) dianut faham modernisasi dalam pembangunannya. Salah satu kelemahan dalam faham modernisasi adalah tidak dapat dihindarkannya perencanaan pembangunan yang terpusat (*centralized planning*). Kerapkali para perencana pembangunan berfikir sebagai "orang kota" yang merencanakan keharusan-keharusan bagi masyarakat pedesaan secara "top down approach" yang tidak sesuai dengan hajat hidupnya. Akibatnya struktur sosial masyarakat di pedesaan mengalami desintegration dan

differensiation ibarat tercabut dari akarnya. Dalam kondisi yang demikian, bila diamati secara cermat, banyak unit-unit keluarga ataupun individu yang secara sosial dan ekonomi tidak dapat survive dan jatuh ke jurang kemelaratan.

2. Dualisme Desa-Kota (*Rural-Urban Dualism*)

Dalam paradigma modernisasi, sadar atau tidak sadar diciptakan pembagian peran (division of role) antara desa dan kota. Desa diposisikan sebagai daerah pertanian, tempat memproduksi bahan baku, dan pemasok tenaga kerja kasar (murah). Sementara kota mempunyai posisi sebagai daerah industri, perdagangan, pusat pemerintahan, dan sumber tenaga kerja terampil. Dengan pembagian posisi yang demikian, secara struktural tercipta kondisi di mana masyarakat pedesaan secara relatif lebih miskin dari pada masyarakat perkotaan. Dalam kemiskinan relatifnya, warga pedesaan seringkali terjerumus ke jurang kemiskinan absolute.

3. Proletarianisasi (*Proletarianization*)

Proletarianisasi adalah suatu proses di mana Petani Pemilik yang mandiri (*self-reliant*) secara berangsur-angsur mengalami degradasi menjadi Petani Kecil (*Small Farmer*), Petani Tak Berlahan/Buruh Tani (*Landless Farmer/Farm Labourer*), dan mungkin selanjutnya atau generasi berikutnya menjadi Buruh Industri yang sangat tidak mandiri. Manakala industri tidak mampu memberikan pekerjaan, tiba saatnya para Buruh Industri tersebut terjebak dalam jurang kemiskinan. Proses ini terjadi karena perubahan struktur sosial dan ekonomi di pedesaan sebagai dampak negatif dari modernisasi. Persaingan yang tidak sehat antara Petani Besar/Kaya (*Landlord*) di satu pihak dengan Petani Kecil dan Buruh Tani (*Peasant*) dilain pihal, di mana program-program pemerintah dan proses

modernisasi itu sendiri lebih memfasilitasi Petani Kaya, menyebabkan pertanian skala kecil menjadi tidak ekonomis dan mengalami kebangkrutan. Sebaliknya Petani Besar/Kaya justru tumbuh semakin besar dan kaya pertanian kapitalis (*Capitalist Farming*). Proses transformasi ini dalam prakteknya tidak lepas dari ekspansi ekonomi pemilik-pemilik modal (*kaum Bourgeaucy*) dari kota ke desa.

4. Marjinalisasi (*Marginalization*).

Marjinalisasi itu sendiri sesungguhnya suatu bentuk proses marjinalisasi di pedesaan. Di perkotaan, marjinalisasi terjadi antara Sektor Formal yang memarjinalkan Sektor Informal, konglomerasi yang memarjinalkan perdagangan-perdagangan kecil/eceran, termasuk aktivitas-aktivitas yang berfaham modernisasi memarjinalkan aktivitas-aktivitas tradisional. Ujungnya adalah kebangkrutan dari mereka yang termarjinalkan. Pedagang Kaki Lima yang setiap saat bisa "ditertibkan", tukang becak yang setiap saat becaknya bisa "diamankan", dan banyak lagi contohnya adalah produk dari proses marjinalisasi.

5. Perusakan Lingkungan (*Environmental Destruction*).

Perusakan lingkungan dikarenakan penyelenggaraan pembangunan yang tidak berkelanjutan (*unsustainable development*) dan tidak ramah lingkungan (*environmentally unfriendly*) juga berakhir pada proses pemiskinan (*povertization*). Dalam kasus ini antara lain erosi lahan (*soil erosion*) karena penggunaannya yang melewati daya dukungnya. Erosi tersebut bisa sampai pada tingkat desertization (menjadi padang pasir) sehingga lahan tidak dapat lagi ditanami dan hilang produktivitasnya, sampai pada keadaan di mana penghuninya

mengalami kelaparan (*famine*). Kasus lain adalah penggundulan hutan (*deforestration*) yang berakibat pada rusaknya ekosistem (*ecosystem*) yang berarti juga hilangnya sumber penghidupan dari masyarakat yang hidupnya bergantung pada keberadaan ekosistem tersebut. Penggundulan hutan juga berakibat pada erosi, desertization, dan bajir yang memperberat beban kehidupan masyarakat miskin. Di perkotaan dan pusat-pusat industri terjadi pencemaran (*polution*) lingkungan, air, udara dan lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat miskin perkotaan yang mendiami daerah-daerah kumuh berupa gangguan kesehatan dan tingginya tingkat kematian (*mortality rate*). Perusakan lingkungan ini pada akhirnya bermuara pada pemiskinan.

Menurut Adiratma (1993) kemiskinan disebabkan jumlah hari kerja rendah dan musiman, sedangkan kesempatan kerja disektor non pertanian jarang terjadi, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan baik teknis maupun manajerial. Kemudian Malik (1994) berpendapat bahwa tidak aka nada perubahan "nasib" bagi orang pemalas dan suka tidur. Dunia dibangun dengan kerja keras bukan dengan angan-angan karenanya manusia miskin adalah karena malas.

Pendapat lain tentang sebab- sebab kemiskinan Soejono (1993) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat terjadi akibat system ekonomi yang berlaku, dimana yang kuat menindas yang lemah, tidak ada sumber pendapatan yang memadai, struktur pemilikan lahan dan penggunaannya yang belum adil dan merata serta usaha yang masih terbelakang dan pendidikan angkatan kerja yang rendah.

Menurut BKKBN, penyebab terjadinya kemiskinan pada keluarga karena:

1. Factor internal yang meliputi : kesakitan, ketidaktahuan, ketidakterampilan, ketinggalan teknologi dan ketidakpunyaan modal..
2. Factor eksternal yaitu sruktur social ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan. Nilai- nilai dan unsure- unsure budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga serta kurangnya akses untuk mendapatkan fasilitas pembangunan (BKKBN, 1998).

Mubyarto (1998) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan situasional. Factor situasional (structural/ eksternal) berasumsi bahwa, kemiskinan yang melanda setiap individu/ sekelompok masyarakat lebih diakibatkan oleh fakta yang bersal dari luar individu/ sekelompok masyarakt tersebut. Berdasarkan fakta objektif diketahui bahwa realitas kemiskinan lebih didominasi oleh kemiskinan structural. Focus kemiskinan structural adalah menyoroti pada proses pemiskinan dan sebab-sebab kemiskinan. Cara pandang kemiskinan structural adalah sedapatnya membongkar penyebab masalah kemiskinan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal. Penganut paham ini menentang asumsi-asumsi teori modernisasi tentang penyebab kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat sebagai akibat dari nilai budaya tradisional (Maliki, 2003)

Dari berbagai teori yang ada bahwa kemiskinan itu sangat bervariatif. Intinya mereka tak mampu memiliki penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka membutuhkan uluran tangan dan bantuan orang lain

untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana meminimalisir tingkat kemiskinan itu.

2.5 Hipotesis

Sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan diatas dan mengacu pada kajian teori dan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Diduga tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpeluang terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
b. Diduga jumlah anggota rumah tangga berpeluang terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
c. Diduga etos kerja berpeluang terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
d. Diduga status pekerjaan berpeluang terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.
e. Diduga kredit usaha berpeluang terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Rino (2008) tentang " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat". Bahwa menurut hasil penelitian ini jumlah penduduk mempunyai hubungan yang paling kuat dengan jumlah penduduk miskin dibandingkan denga penduduk umur 10

tahun ke atas yang tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD. Jika terjadi kenaikna jumlah penduduk akan menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin dan sebaliknya. Jika terjadi kenaikna jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD akan menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin begitupun sebaliknya. Jika terjadi kenaikan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB akan menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin dan sebaliknya jika terjadi penurunan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB akan menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin dengan asumsi besarnya variable lain dalam penelitian ini tetap. Secara keseluruhan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang belum/ tidak sekolah dan tamat SD dan kontribusi sector pertanian terhadap PDRB mampu menjelaskan perubahan jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan perubahan variable lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

2. Yossi (2010) tentang " Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman". Bahwa menurut hasil penelitian ini Secara bersama-sama tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan rumah tangga miskin. Perbedaan dengan penelitian ini adalah daerah penelitiannya dimana Yossi mengambil daerah penelitian denga ruang lingkup Padang Pariaman sedangkan penelitian ini mengambil daerah penelitian dengan ruang lingkup Kabupaten Dharmasraya. Perbedaan lain terletak pada variable bebasnya, Yossi menggunakan tiga variable bebas yaitu tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status pekerjaan, dan jumlah anggota rumah tangga.

Sedangkan dalam penelitian ini terdapat lima variable bebas diman tiga variable yang digunakan sama dengan Yossi, dalam penelitian ini ada penambahan dua variable bebas yaitu etos kerja dan kredit usaha.

2.7 Kerangka Pikir

2.7.1 Hubungan tingkat Pendidikan dengan kemiskinan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku (tingkah laku) seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Hasibuan (2000) menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan keahlian teoritis, konseptual dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan bagi karyawan.

Selanjutnya menurut Rousseau (dalam Hasbullah; 2003) pendidikan adalah memberi perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Sejalan dengan ini, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tercantum pengertian pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan merupakan salah satubentuk investasi sumber daya manusia yang utama. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan segala potensi manusia untuk menghadapi masa depannya (Widiawati, 1994).

Sebagian besar ekonom sepakat bawha sumber daya manusia (human resources) dari suatu bangsa, bukan modal fisik ataupun sumber daya material, merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan.

Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan. Bahkan, ada bangsa atau yang terkecil adalah keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi kualitas perumahan, pakaian, bahkan makanan, demi melaksanakan pendidikan anak-anaknya.

Peter William Musgrave, seorang sosiologi Inggris seperti dikutip (Kholis: 2000) mengidentifikasikan berbagai fungsi pendidikan yang mencakup berbagai bidang yaitu :

a. Fungsi Politik

   Mencakup pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, yang natinya diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia yang mendukung sistem pendidikan tentang tatanan suatau negara, dan atau mencetak kader kepemimpinan nasional.

b. Fungsi Ekonomi

   Pendidikan menghasilkan tenaga kerja bermutu dan meningkatkan pendapatan individu dan meningkatkan ekonomi negara.

c. Fungsi Seleksi

Pendidikan bisa menyebabkan seleksi secara natural bagi kelas- kelas sosial Tertentu. Dengan pendidikan seseorang akan terseleksi dan memasuki kelas tertentu.

d. Fungsi Stabilitas dan Perubahan

Pendidikan bisa menstabilisir atau melestarikan budaya sekaligus merubah dan mengembangkannya.

e. Fungsi Pendidikan sebagai " Agen Perubahan"

Tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pendidikan memiliki hubungan yang dekat dengan semua aspek struktur sosial seperti politik, agama, keluarga, stratifikasi sosial, mobilitas dan kesempatan kerja.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan pengertian umum pendidikan adalah merupakan usaha sadar yaitu mengembangkan kemampuan manusia secara maksimal sehingga bermanfaat bagi kehidupannya ataupun bagi lingkungan dimana ia berada. Untuk menerapkan tujuan itu diperlukan usaha terencana, terarah dan sistematis yang dilaksanakan baik dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi dengan meningkatnya kualitas angkatan kerja, maka akan meningkat pula mobilitas tenaga kerja. Dengan tingginya pendidikan, maka akan tinggi pula kesempatan kerja sehingga akan menambah pendapatan dan mempunyai kesempatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

Manfaat pendidikan dapat dilihat sebagai nilai tambah (*value added*) yang diperoleh seseorang karena mendapatkan suatu pendidikan tertentu. Nilai tambah ini secara umum merupakan peningkatan derajat, harkat dan martabat seseorang. Sedangkan secara khusus dapat dipandang sebagai peningkatan kemampuan berfikir (*cognitif*), bersikap dan berprilaku (*affective*), serta ketermapilan atau keahlian (Elfindri, 2001).

Menurut simanjuntak (1998) peningkatan pendidikan akan meningkatkan kemampuan kerja/ produktifitas seseorang dalam bekerja untuk memperoleh pendapatannya dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi mempunyai produktifitas yang lebih tinggi sehingga akan memperoleh balas jasa yang tinggi pula hampir di semua sektor.

Apabila seseorang tidak pernah memperoleh pendidikan atau berpendidikan rendah, maka secara langsung hal tersebut akan mempersulit mereka dalam memperoleh pekerjaan dan jika mereka dapat bekerja, maka pendapatan yang mereka dapatkan akan sangat rendah dibandingkan penduduk yang berpendidikan tinggi.

2.7.2 Hubungan jumlah anggota keluarga dengan Kemiskinan

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal disuatu rumah tangga, baik yang berada dirumah pada waktu pencacahan maupun sementara sedang tidak. Anggota rumah tangga yang telah bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk pindah/ menetap/ anggota rumah lagi demikian pula sebaliknya (SUSENAS, 2009).

Dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri dan anak. Semakin banyak anggota rumah tangga yang disebabkan oleh banyaknya jumlah anak ataupun anggota keluarga lain yang ikut tinggal di dalam rumah tangga tersebut maka akan menyebabkan beban tanggungan kepala rumah tangga semakin besar karena kepala rumah tangga memiliki fumgsi utama pencari nafkah dalam keluarga. Jika dilihat pada rumah tangga miskin yang tingkat pendapatannya rendah, dengan semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga maka beban hidupnya semakin berat dan jelas berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan mereka.

BPS (2008) mendefinisikan ukuran rumah tangga menyatakan jumlah seluruh anggota yang menjadi tanggungan dalam rumah tangga tersebut. Ukuran rumah tangga dapat memberikan indikasi beban rumah tangga. Semakin besar ukuran rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumah tangga yang pada akhirnya akan semakin berat beban rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut Todaro, bagi masyarakat miskin anak dipandang sebagai investasi ekonomi yang nantinya diharapkan akan mendatangkan suatu hasil baik dalam bentuk tambahan tenaga kerja maupun sebagai sampingan finansial orang tua di usia lanjut, sehingga penduduk di negara- negara berkembang mudah sekali beranak pinak karena kondisi dan ekonomi (Todaro,2000)

Dalam memutuskan perlu tidaknya tambahan anak, para orang tua yang berfikir rasional akan selalu memperhitungkan untung dan ruginya secara ekonomis. Keuntungan yang paling utama diharapkan adalah pendapatan yang diperkirakan

dapat dihasilkan dari tenaga si anak bila dia di kebun atau disawah keluarga, serta jaminan keuangan bagi ayah dan ibu dihari tua (Asnawi, 1994).

Namun dibalik semua itu ada biaya yang harus dikeluarkan dalam memiliki anak. Semakin banyak anak maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Besarnya jumlah anggota rumah tangga menyebabkan kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi. Sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan hanya sedikit sisanya bahkan mungkin tidak ada yang ditabung. Akibatnya, pembentukan modal pada kelompok keluarga miskin menjadi rendah dan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup menjadi sangat terbatas.

2.7.3 Hubungan etos kerja dengan Kemiskinan

Dalam era globalisasi, persaingan kerja yang semakin meningkat memaksa setiap orang untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu (Wills, 1993). Untuk dapat menjawab tantangan ini diperlukan adanya dedikasi, kerja keras dan kejujuran dalam bekerja. Menurut Anoraga (1992) manusia yang berhasil harus memiliki pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur untuk eksistensi manusia. Suatu pandangan dan sikap demikian dikenal dengan istilah Etos Kerja. Dewasa ini Etos Kerja merupakan topik yang kembali hangat. Telah sekian lama Indonesia selalu berkutat dengan masalah korupsi, "jam karet", asal kerja, semrawut dan predikat negatif lainnya. Berbeda dengan kondisi di negara Jepang, yang menjadikan kerja sebagai sesuatu yang sangat mulia, dan kualitas kerja merupakan nilai-nilai penting yang didasari spiritualitas agama (www.posindonesia.co.id)

Untuk dapat meningkatkan Etos Kerja ini, diperlukan adanya suatu sikap yang menilai tinggi pada kerja keras dan sungguh sungguh. Karena itu perlu ditemukan suatu dorongan yang tepat untuk memotivasi dan merubah sikap rakyat kita. Nilai-nilai sikap dan faktor motivasi yang baik menurut Anoraga (1992) bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam/terinternalisasi dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Dalam situs resmi kementerian KUKM, Etos Kerja diartikan sebagai sikap mental yang mencerminkan kebenaran dan kesungguhan serta rasa tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas.

Melalui berbagai pengertian diatas baik secara etimologis maupun praktis dapat disimpulkan bahwa Etos Kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang sekelompok manusia untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya. Produktivitas tenaga kerja yang yang diindikasikan melalui jam kerja. Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerjaan semakin produktif, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatnya pendapatan maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.7.4 Hubungan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga dengan Kemiskinan

Menurut BPS, status pekerjaan dibagi menjadi lima bagian yaiu: (1) berusaha/ bekerja sendiri, (2) berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, (3) berusaha dibantu dengan buruh tetap, (4) buruh/karyawan/pekerja dibayar, dan (5) merupakan pekerja tidak dibayar. Menurut konsep BPS, status pekerjaan nomor (1), (2) dan (5)

merupakan pekerjaan sector informal dan selain itu termasuk pekerjaan sector formal (BPS,2005)

Menurut Rachbini (dalam Mulyadi; 2003) terdapat dua faktor yang mengakibatkan munculnya dualisme ekonomi antara sektor formal dan informal. Pertama berkait dengan faktor eksternal dan kedua faktor internal.

Termasuk dalam faktor eksternal dalam hal *pertama,* bahwa pranata-pranata yang ada mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern. Meskipun tampak seperti sebuah kesatuan sistem yang bersifat komplementer dan saling membutuhkan satu sama lain, namun pranata formal dan informal bersifat *disagregratif* satu sama lain. Posisinya yang subordinatif dan resesif inilah mengakibatkan sektor informal memiliki posisi tawar yang sangat lemah, sehingga tidak memberikan peluang yang lebih luas dan prospeknya juga kurang menguntungkan.

Kedua, yang termasuk ke dalam faktor eksternal juga terjadinya kesenjangan upah. Diskriminasi tingkat upah baik oleh lembaga-lembaga informal, birokrasi maupun lingkungan pelaku-pelaku ekonomi formal sendiri ikut mengekalkan keterpisahan dua sektor tersebut.

Ketiga, terkait dengan masalah teknis politis, dimana para pelaku politik (kalangan birokrasi) di Indonesia kurang mencermati dan memahami perkembangan modernisasi yang begitu cepat. Faktor ketiga ini ditandai dengan adanya paradoks pengambilan keputusan di tingkat pusat dan lokal (daerah) serta paradoks peraturan yang mendukung dan merusak berbagai kegiatan sektor informal.

Sedangkan yang berkaitan dengan faktor internal adalah tingkat produktivitas yang sangat tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini ditunjukkan sektor formal daripada sektor Informal. Pada sektor formal ditunjukkan oleh *marginal productivity of labor* (MPL) yang sangat tinggi. Semuanya itu terjadi akibat ketimpangan dalam penguasaan akses terhadap modal, kredit, sumber daya pekerjaan, teknologi dan proses pengolahan informasi. Dalam hal ini penguasaan terhadap aset produksi, sektor formal jauh lebih mampu berkembang secara pesat seiring dengan perkembangan modernisasi yang terjadi. Lain halnya yang terjadi pada sektor informal, mereka sama sekali sulit memperoleh akses modal, teknologi, apalagi harus menjangkau teknologi yang perkembangannya jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kinerja sektor informal.

Firdausy yang menyatakan bahwa sektor informal terdiri dari orang yang bekerja sendiri, pekerjaan sendiri dibantu anggota keluarga, buruh tani dan tenaga kerja yang tidak menerima upah (M. Carunia, 2004). Sektor informal identik dengan kemiskinan, karena pekerjaan pada sektor informal tidak banyak memberikan keuntungan karena pada umumnya tujuan mereka bukanlah mencari laba setinggi-tingginya tetapi motivasinya hanya sekedar untuk hidup (Survive), maka sering pendapatan mereka rendah dan tidak menentu/tidak tetap. Mereka memilih sektor informal karena tersisih dari sektor formal yang diinginkan oleh kebanyakan orang karena menjanjikan pendapatan yang tinggi.

Sebenarnya pengertian tentang sektor informal telah ada suatu kesamaan pandangan (kosensus) bahwa sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah.

Sedangkan unit-unit usaha yang mendapatkan proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah disebut sektor formal. Proteksi ekonomi itu antara lain berupa tarif proteksi, kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan, penyuluhan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, terjaminnya arus teknologi impor, hak paten dan lain sebagainya.

Perekonomian di sektor informal relatif dapat lebih mandiri, karena pertumbuhan di sektor formal secara langsung memperbaiki kesejahteraan golongan ekonomi lemah, maka kemajuan dalam sektor informal sekaligus menaikkan pendapatan nasional (meskipun tidak banyak) dan memperbaiki distribusi pendapatan. Bila di sektor formal kurangnya permintaan dapat menyebabkan kelesuan perekonomian, di sektor informal permintaan akan selalu kuat, sebab barang dan jasa yang dihasilkan di sektor ini merupakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

2.7.5 Hubungan kredit usaha dengan Kemiskinan

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan

dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri,BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). (www. bi.com)

Hal ini sangat baik dilakukan karena mengingat Terbatasnya akses sumber pendanaan bagi masyarakat miskin dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha untuk memperluas kesempatan kerja dan terciptanya kegiatan ekonomi bagi masyarakat/keluarga miskin.

Tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat adalah (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. (2)untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. (3)untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009 yang dilakukan oleh BPS Sumatera Barat. Sifat data adalah data primer atau row data (data mentah). Data hasil Susenas ini menghimpun banyak informasi tentang kemiskinan dan tingkat kesejateraan masyarakat.kemudian data pendukung lainnya diperoleh dari, jurnal penelitian, buku-buku teori yang berhubungan dengan penelitian ini, buku terbitan BPS dan internet.

3.2 Konsep dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari variable dependent dan variable independent. Variable dependent merupakan variable yang terkait atau dipengaruhi oleh variable lain. Variable dependent pada penelitian ini yaitu kemiskinan. Sedangkan variable independent merupakan variable yang dianggap berpengaruh terhadap variable lain. Variable independentnya terdiri dari variable tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, etos kerja, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, dan kredit usaha. Definisi variable dan pengukurannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga Miskin

Yaitu rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan minimum) sehari-sehari. Atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Dalam hal ini pengukuran kemiskinan mengacu pada pendekatan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan. Selanjutnya, dari rata-rata pengeluaran per bulan tersebut dibandingkan dengan garis kemiskinan sehingga akan diperoleh data rumah tangga yang miskin dan yang tidak miskin di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rangka menentukan rumah tangga miskin, ditentukan berdasarkan batas kecukupan/garis kemiskinan perkapita perbulan. Untuk Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 garis kemiskinan ditentukan sebesar Rp.229.181,- perkapita/bulan (Data BPS). Dengan demikian bagi rumah tangga hasil Susenas yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan kurang dari Rp.229,181- perbulan maka rumah tangga tersebut dikategorikan miskin, sedangkan yang pengeluaran perkapitanya lebih dari Rp.229,181- maka rumah tangga tersebut tidak miskin. Selanjutnya dengan menggunakan *dummy variable* untuk rumah tangga miskin diberi skor 1 (satu) dan rumah tangga yang tidak miskin diberi skor 0 (nol).

2. **Variabel Tingkat Pendidikan**

Variabel pendidikan sangat erat kaitannya dengan motivasi seseorang dalam suatu pekerjaan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin besar pula motivasi orang tersebut untuk dapat memperoleh suatu kedudukan yang lebih baik dalam suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan rendah. Pegawai yang berpendidikan rendah cenderung motivasinya rendah pula untuk bekerja.

Variabel tingkat pendidikan terdiri dari tingkat pendidikan kepala keluarga dan tingkat pendidikan istri. Tingkat pendidikan dinyatakan dalam pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang menurut BPS didefinisikan sebagai tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ ijazah. Dalam penelitian ini pendidikan diklasifikasikan menjadi tamat SLTP ke bawah dan besar dari SLTA. Jika kepala rumah tangga termasuk dalam kategori tamat SLTP kebawah maka dilambangkan dengan skala 1. Tetapi jika pendidikan kepala rumah tangga tidak termasuk dalam kategori tersebut maka dilambangkan dengan skala 0.

3. **Variabel Jumlah Anggota Rumah Tangga**

Jumlah rumah tangga yang dimaksud dengan penelitian ini adalah jumlah anggota rumah tangga yang biasanya bertempat tinggal dalam suatu rumah tangga (BPS,2007). Jumlah anggota rumah tangga diklasifikasikan yaitu jumlah anggota rumah tangga $\geq$5 orang maka

dilambangkan dengan skala 1 dan jumlah anggota rumah tangga tidak termasuk dalam kategori tersebut dilambangkan dengan skala 0.

4. **Variabel Etos kerja**

Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerjaan semakin produktif, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatnya pendapatan maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika jam kerja diatas 35 jam perminggu dilambangkan dengan skala 0, tetapi jika jam kerja dibawah dari 35 jam perminggu dilambangkan dengan 1.

5. **Variabel Status Pekerjaan Kepala Rumah tangga**

Status ekonomi rumah tangga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi dari Kepala Rumah Tangga maupun Anggota Rumah Tangga serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap sumber keuangan rumah tangga. Variable sector pekerjaan kepala rumah tangga diukur dengan menggunakan kategori bekerja disektor informal yang dilihat dari status pekerjaannya. Status pekerjaan yang termasuk kategori pekerjaan sector informal menurut BPS yaitu: berusaha/ bekerja sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tetap dan pekerja tidak dibayar. Jika kepala rumah tangga bekerja pada sector informal maka dilambangkan dengan skala 1. Tetapi jika kepala rumah tangga bekerja selain kategori tersebut maka dilambangkan denga skala 0

6. Variable Kredit Usaha

Dalam penelitian ini dilihat dari apakah ada anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir, dimana bentuk kredit usaha yang bersumber dari antara lain: Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat (PNPM) Mandiri, Program pemerintah lainnya, Program Bank, Program Koperasi/Yayasan, perorangan, dan lainnya. Jika kepala rumah tangga tidak memperoleh kredit modal untuk usaha maka dilambangkan dengan skala 1. Tetapi jika selain kategori tersebut maka dilambangkan dengan skala 0.

Tabel 3.1

Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisis Logistik

Variabel	Pertanyaan Dalam SUSENAS	Skala
Variabel Dependent ➢ Rumah Tangga Miskin(Garis Kemiskinan)	No.25, hal 6	1.< RP 229.181/kapita/bln 0. lainnya
Variabel independent ➢ Pendidikan Kepala Keluarga	No.14, hal 3	1. SLTP ke bawah 0. Lainnya
➢ Jumlah Anggota Rumah Tangga	Keterangan Rumah Tangga, hal 2	1. ≥5 orang 0. Lainnya
➢ Etos kerja	No.23, hal 4	1. ≤ 35 jam/minggu 0. Lainnya
➢ Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	No.25, hal 4	1. Sector informal 0. lainnya
➢ Kredit Usaha	No. 5a, hal 7	1. Tidak Menerima Kredit 0. Menerima Kredit

3.3. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan metode analisa deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variable yaitu dalam bentuk penyajian data kemudian dilakukan analisis presentase serta memberikan interpretasi terhadap analisa tersebut.

Sedangkan untuk menjawab hipotesa pada penelitian ini selanjutnya dilakukan penghitungan regresi, ditujukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel pendidikan yang ditamatkan, jumlah anggota keluarga, etos kerja, status pekerjaan, kredit usaha dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya. Analisis ini menggunakan analisis *Logistic Regres* menunjukkan probabilitas penduduk miskin. Probabilitas ini didasarkan pada asumsi mengenai variabel random yang diteliti berbentuk *logistic distribution fungtion model*. Model ini akan digunakan dalam penelitian analisis penyebab kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya. Menurut Gujarati (2000) Logistik Model berasal dari *Logistic Distribution Function* dengan persamaan :

$$Li = Ln \left[\frac{Pi}{1 - Pi} \right] = \beta o + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 \varepsilon \ldots\ldots\ldots$$

dimana,

$\left[\frac{Pi}{1-Pi}\right]$ = Kemungkinan penduduk dalam kondisi tertentu

βo = Konstanta

X_1 = Tingkat pendidikan yang diukur dengan pendidikan yang ditamatkan

1 = Pendidikan SLTP ke bawah

0 = Lainnya

X_2 = Jumlah anggota rumah tangga

1 = $\geq$5 orang

0 = lainnya

X_3 = Etos kerja

1 = dibawah 35 jam perminggu

0 = lainnya

X_4 = Status pekerjaan yang diukur dengan sector pekerjaan

1 = Status pekerjaan informal

0 = Status pekerjaan formal

X_5 = Kredit usaha

1 = tidak menerima kredit

0 = menerima kredit

εi = Kesalahan pengganggu

Untuk lebih meyakinkan hasil penghitungan regresi di atas selanjutnya dilakukan uji statistik. Model di atas akan diestimasi dengan pendekatan maximum *likelihood* menggunakan program SPSS versi 11.5 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji sebagai berikut :

a. Uji Wald Test :

Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu (parsial) terhadap variabel terikat. Wald Test ini dilakukan dengan membandingkan nilai Wald Test dengan nilai t tabel. Nilai t tabel didapat dengan cara N – df dengan tingkat kepercayaan (α) 0,05 dan untuk menghitung t-test diperoleh dengan rumus :

$$\text{Wald Test} = \left(\frac{\beta_i}{\text{Se}\beta_i} \right)^2$$

Dimana,

β_i = Koefisien Regresi

$\text{Se}\beta_i$ = Standar Eror β_i

Uji χ^2 (Chi Square test) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap varibel terikat. Uji χ^2 dilakukan dengan membandingkan nilai χ^2 hitung dengan χ^2 tabel. Dengan derajat kebebasan sebanyak variabel bebas dan tingkat kepercayaan (α) 0,05. Jika nilai χ^2 hitung lebih besar dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya bila nilai χ^2

Hitung lebih kecil dari nilai χ^2 tabel maka secara bersama-sama variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Adapun untuk mendapatkan nilai χ^2 hitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$\chi^2 = \sum_{}^{G} Ni \frac{(Pi - Pn)^2}{Pn(1 - Pn)}$$

Dimana,

χ^2 = Chi Square

Ni = Frekuensi pada masing-masing variabel

Pi = Probabilitas yang aktual/diteliti

Pn = Probabilitas yang diharapkan

G = Jumlah variable

b. Uji *Odds Ratio* :

Uji *odds ratio* digunakan untuk mengetahui penduduk berstatus miskin atau tidak miskin dengan menggunakan persamaan :

$$OR = e^{bi}$$

Dimana,

OR = Odd Ratio

e = Log Natural yang bernilai 2,71828

bi = Koefisien Logistik variabel ke-i

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang cukup berpotensi di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah yang mencapai 2961,13 km^2 atau 296.113 Ha. Kabupaten Dharmasraya terbagi ke dalam 4 kecamatan dan 21 nagari.

Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi geografis 0^0 47' 7'' lintang selatan – 1^0 41'46'' lintang selatan & 101^0 9'21'' bujur timur – 101^0 54' 27'' bujur timur.

Kabupaten Dharmasraya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Sebelah Selatan : Kabupaten Tebo di Propinsi jambi

Sebelah Timur : Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau

Sebelah Barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Kondisi dan topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian 100 meter sampai 500 meter dari permukaan laut. Selama tahun 2008 rata-rata hujan mencapai 7, 42 hari/ bulan, sedangkan rata-rata curah hujan 232,00 mm/ bulan.

Komposisi lahan Kabupaten Dharmasraya terbanyak adalah hutan dan perkebunan pada tahun 2008 luas hutan tercatat 119.386,9 Ha atau 40, 32%,

sementara perkebunan seluas 131.348,0 Ha atau 44,36 %. Sementara untuk permukiman penduduk seluas 6.621,6 Ha atau 2.24%.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 11 kecamatan yang meliputi nagari dan jorong didalamnya. Kecamatan tersebut yaitu: Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto baru, Koto Salak, tiumang, Padang laweh, sitiung, Timpeh, Pulau Punjung dan IX Koto.

4.1.2 Gambaran Umum penduduk kabupaten Dharmasraya

Jumlah penduduk di Dharmasraya dari tahun ketahun terus meningkat, Kabupaten Dharmasraya dengan luas wilayah 2961,13km2 yang terbagi ke dalam 4 kecamatan dan 21 nagari, berdasarkan Survei penduduk antar sensus 2005, jumlah penduduknya telah mencapai 165.232. Pada tahun 2006 penduduk Kabupaten Dharmasraya berjumlah 170.232 jiwa, pada tahun 2007 bertambah menjadi 175.573 jiwa dan pada tahun 2008 berjumlah 180.915 jumlah ini terus meningkat pada tahun 2009 menjadi 186.354 jiwa.

Grafik 4.1

Perkembangan Penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2005-2009

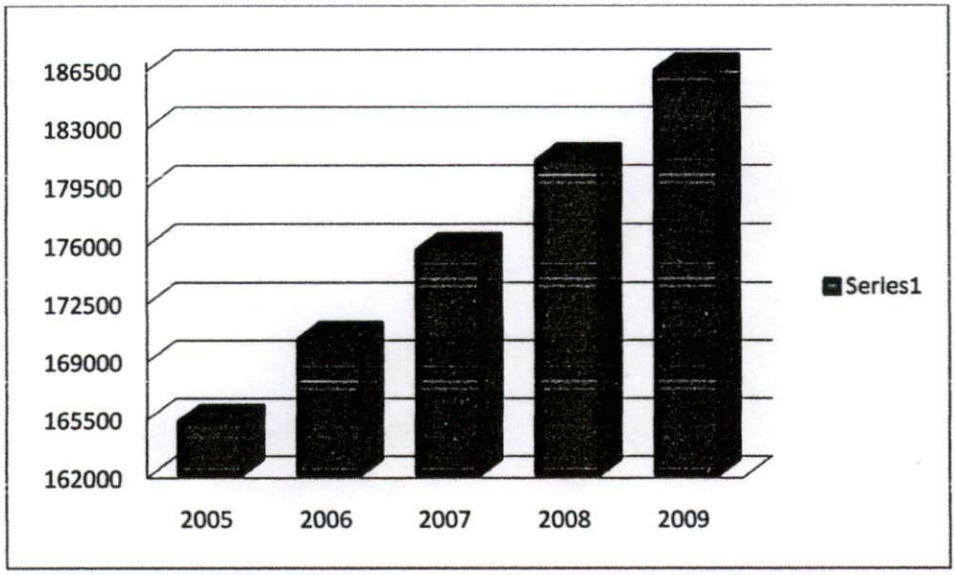

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2008 tercatat sebanyak 180.915 orang. Komposisi menurut jenis kelamin terdiri dari 92.521 orang laki-laki dan 88.394 perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 5.342 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2007 dari 175.573.

Distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan, terbanyak berdomisili di Kecamatan Koto Baru sebanyak 61.196 orang selanjutnya kedua terbanyak di kecamatan sungai Rumbai 44.979 orang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit besada di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 37.555 orang.

Selanjutnya jumlah penduduk tersebut dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di setiap kecamatan, sehingga terlihat rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga tertinggi berada di Kecamatan Sitiung yaitu rata 4,30 orang per

rumah tangga sedangkan Kecamatan Pulau Punjung hanya 4,07 per rumah tangga. Sementara itu, jika dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan, penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Sitiung yaitu sebesar 115,34 orang per Km^2, dan paling jarang justru di Kecamatan Pulau Punjung yakni 39,67 orang per Km^2.

Sedangkan pada tahun 2009, jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya berjumlah 186.354 orang, jumlah ini mengalami kenaikan 3 % dari tahun 2008 yaitu sebesar 5.439 orang. Distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan pada tahun 2009 terbanyak berdomisili di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 34.847 orang dan distribusi sebesar 18,70 persen dari total penduduk kabupaten. Selanjutnya kedua terbanyak di Kecamatan Koto Baru sebanyak 27.950 orang, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan padang Laweh yaitu sebanyak 5.320 orang.

Berdasarkan data terbaru hasil pencacahan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya (angka sementara) adalah 191.277 jiwa berarti sex rationya tercatat tercatat sebesar 107. Dari SP2010 tersebut tercatat kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah kecamatan pulau punjung yaitu 35.768 jiwa (18.70 % dari jumlah penduduk Dharmasraya) dengan sex rationya sebesar 107.91. kecamatan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Koto Baru,yaitu tercatat sebanyak 28.688 jiwa (persen dari jumlah penduduk Dharmasraya, sex rationya adalah 104,64.

Dari hasil SP2010 diketahui laju perumbuhan penduduk adalah sebesar 3,10 persen pertahun. Kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah

kecamatan asam jujuhan takni sebesar 7,83 persen dan terendah adalah kecamatan Tiumang yakni sebesar 1,12 persen.

Dengan luas wilayah 2961,13 Km^2 yang didiami 191.277 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya adalah sekitar 65 jiwa/km^2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannnya adalah Sungai Rumbai yakni sebanyak 379 jiwa/Km^2. Sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan IX Koto yakni sebesar 16 jiwa/Km^2.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Sei.Rumbai	9441	8590	18031	109,91
2	Koto Besar	11842	11013	22855	107,53
3	Asam Jujuhan	5665	4876	10541	116,18
4	Koto Baru	14669	14019	28688	104,64
5	Koto Salak	7658	7395	15053	103,56
6	Tiumang	5712	5381	11093	106,15
7	Padang Laweh	2839	2529	5368	112,26
8	Sitiung	11850	11241	23091	105,42
9	Timpeh	6923	6533	13456	105,97
10	Pulau Punjung	18564	17204	35768	107,91
11	IX Koto	3708	3625	7333	102,29
	Jumlah	**98871**	**92406**	**191277**	**105.56**

Laporan Hasil Sensus Penduduk 2010 Kab.Dharmasraya Angka Sementara

4.2 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya

Di Kabupaten Dharmasraya sendiri angka kemiskinan juga tidak sedikit. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk miskin, dimana Pendataan yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan tiap tahunnya.

Tabel 5.4
Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
Tahun 2009

No	Kondisi Rumah Tangga	Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga				Jumlah Rumah Tangga
		Informal		Formal		
		RT	Persentase	RT	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Miskin	3.432	84,1%	647	15,9%	4.079
2	Tidak Miskin	27.207	69,2%	12.133	30,8%	39.340
Jumlah		30.639	70,6%	12.780	29,4%	43.419

Sumber: Data Diolah dari Susenas 2009

Berdasarkan hasil Susenas 2009, terdapat sebanyak 70,6 persen kepala rumah tangga dari seluruh kepala rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya yang bekerja pada sektor informal, sedangkan yang bekerja pada sektor formal tercatat sebanyak 12.780 kepala rumah tangga atau sebanyak 29,4 persen dari seluruh kepala rumah tangga yang bekerja di Kabupaten Dharmasraya.

Jika status pekerjaan dikaitkan dengan kondisi rumah tangga, dari seluruh rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 84,1 persen kepala rumah tangga yang bekerja di sektor informal dan termasuk ke dalam kelompok rumah tangga miskin. Hanya tercatat sebanyak 15,9 persen dari seluruh rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja pada sektor formal.

Selanjutnya, jika dilihat hubungan antara status pekerjaan dengan rumah tangga tidak miskin tampak bahwa terdapat sebanyak 69,2 persen dari seluruh rumah tangga yang tidak miskin memiliki pekerjaan di sektor informal, sedangkan yang

bekerja pada sektor formal hanya tercatat sebanyak 30,8 persen dari total rumah tangga tidak miskin.

Dari gambaran di atas tampak bahwa status pekerjaan kepala rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya berhubungan erat dengan kondisi rumah tangga (miskin atau tidak miskin).

5.5. Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha

Salah satu penyebab terbentuknya rumahtangga miskin adalah ketidakmampuan rumahtangga untuk menghasilkan barang dan jasa karena adanya kesulitan dalam permodalan untuk melakukan kegiatan usaha. Kredit usaha yang sekarang gencar dilaksanakan oleh pemerintah merupakan salah satu program dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 5.5
Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Penerimaan Kredit Usaha
Tahun 2009

No	Kondisi Rumah Tangga	Kredit Usaha				Jumlah Rumah Tangga
		Tidak Menerima Kredit		Menerima Kredit		
		RT	Persentase	RT	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Miskin	130	3,2%	3.949	96,8%	4.079
2	Tidak Miskin	966	2,5%	38.374	97,5%	39.340
Jumlah		30.639	2,5%	42.323	97,5%	43.419

Sumber: Data Diolah dari Susenas 2009

Berdasarkan hasil Susenas 2009, rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya yang tidak menerima kredit usaha terdapat sebanyak 3,2 persen sedangkan sisanya yakni sebanyak 96,8 persen adalah rumahtangga yang telah menerima kredit usaha.

Sementara itu, pada kelompok rumah tangga yang tidak miskin terdapat sebanyak 2,5 persen adalah rumah tangga dengan rumahtangga yang tidak pernah menerima kredit usaha, sedangkan rumah tangga yang pernah menerima kredit usaha terdapat sebanyak 97,5 persen.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Dharmasraya kredit usaha menjadi variabel yang cukup penting dalam mengkaji rumah tangga miskin. Kemampuan usaha rumahtangga rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya sebagai penyebabnya adalah masih banyaknya kepala rumah tangga yang kesulitan dalam melakukan usaha karena tidak adanya modal yang memadai. Apabila kemampuan masyarakat ini dapat dibantu dengan adanya kredit usaha diharapkan tingkat pendapatan rumah tangga dapat lebih ditingkatkan lagi yang pada akhirnya akan dapat mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.6. Hasil Estimasi

Dalam rangka menjawab hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya dilakukan perhitungan regresi logistic yang diolah dengan menggunakan pengolahan komputer melalui paket program *SPSS 11.5 for windows*.

Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik kepala rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang

ditamatkan, jumlah anggota rumahtangga, etos kerja, status pekerjaan dan kredit usaha. Hasil penghitungan regresi logistik adalah seperti pada tabel 5.6

Tabel 5.6
Hasil Penghitungan Regresi Logistik

Variabel	B	SE	Wald	df	Sig	Exp (B)
Pendidikan Kep.Rumahtangga (X_1)	1,310	0,061	468,113	1	0,000	3,707
Jumlah Anggota Rumahtangga (X_2)*	0,037	0,034	1,140	1	0,286	1,037
Etos Kerja (X_3)*	0,772	0,037	440,142	1	0,000	2,165
Status Pekerjaan (X_4)*	0,425	0,046	83,821	1	0,000	1,529
Kredit Usaha (X_5)	0,206	0,097	4,532	1	0,033	1,229
Konstanta	1,442	0,098	217,449	1	0,000	4,230
χ^2 dengan df = 5 sebesar 1571,333 χ^2_{tabel} dengan df = 5 sebesar 11,07						

Catatan: *) = Signifikan pada tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05

Tabel 5.6 memperlihatkan bahwa dari 5 variabel bebas yang diteliti ternyata seluruhnya menunjukkan pengaruh yang positif tetapi memberikan pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan Rumahtangga di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya, dari hasil regresi diperoleh nilai $\chi^2_{\text{-hitung}}$ sebesar 1571,333. Sedangkan nilai $\chi^2_{\text{-tabel}}$ dengan df=5 dan nilai α = 5 persen sebesar 11,07 sehingga nilai $\chi^2_{\text{-hitung}} > \chi^2_{\text{-tabel}}$. Dengan demikian seluruh variabel yakni pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumahtangga, etos kerja, status pekerjaan dan kredit usaha secara bersama-sama berpeluang terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya.

Bentuk pengaruh antara pendidikan kepala rumah tangga (X_1) terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya (Y) adalah **positif**. Maksudnya, kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SLTP kebawah. Dari tabel 5.6 terlihat bahwa koefisien regresi variabel pendidikan kepala rumah tangga sebesar 1,310 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0: **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a: **diterima**, yang berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Bentuk pengaruh antara jumlah anggota rumahtangga yang dinotasikan dengan X_2 terhadap jumlah rumahtangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **positif.** Maksudnya rumah tangga yang memiliki anggota rumahtangga 4 orang ke bawah peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang memiliki anggota rumahtangga 5 orang ke atas. Dari tabel 5.6 terlihat bahwa koefisien regresi variabel jumlah anggota rumahtangga sebesar 0,037 dan *probability significancy* sebesar 0,286 dengan demikian H_0: **diterima** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a: **ditolak**, yang berarti bahwa pengaruh jumlah anggota rumahtangga terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **tidak signifikan**.

Bentuk pengaruh antara jumlah etos kerja yang dinotasikan dengan X_3 terhadap jumlah rumahtangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **positif.** Maksudnya rumah tangga yang kepala anggota rumahtangganya memiliki etos kerja

yang baik (bekerja lebih dari 35 jam perminggu) peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumahtangganya memiliki etos kerja yang rendah (bekerja kurang dari 35 jam perminggu). Dari tabel 5.6 terlihat bahwa koefisien regresi variabel etos kerja sebesar 0,772 dan *probability significancy* sebesar 0,000 dengan demikian H_0: **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a: **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh etos kerja kepala rumahtangga terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **signifikan**.

Selanjutnya bentuk pengaruh dari variabel status pekerjaan (formal dan informal) yang dinotasikan dengan X_4 terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **positif**. Maksudnya kepala rumah tangga yang bekerja **formal** peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja **informal**. Dari tabel 5.6 terlihat bahwa koefisien regresi variabel status pekerjaan sebesar 0,425 dan *probability significancy* sebesar 0,0000 dengan demikian H_0: **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a: **diterima**, yang berarti bahwa pengaruh status pekerjaan terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya adalah **signifikan**.

Demikian juga halnya dengan variabel kredit usaha, dimana bentuk bentuk pengaruh antara kredit usaha (X_4) terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya (Y) adalah **positif**. Maksudnya, kepala rumah tangga mendapatkan kredit usaha peluangnya lebih rendah untuk masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha. Dari

tabel 5.6 terlihat bahwa koefisien regresi variabel kredit usaha sebesar 0,206 dan *probability significancy* sebesar 0,000. Dengan demikian maka H_0: **ditolak** dan hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini H_a: **diterima**, yang berarti bahwa kredit usaha berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil estimasi persamaan model logistik pada rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya diperoleh model regresi logistik sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = Ln\ \{p/1\text{-}p\} = 1{,}442 + 1{,}310X_1 + 0{,}037\ X_2 + 0{,}772\ X_3 + 0{,}425\ X_4 + 0{,}206\ X_5}$$

Dari model logistik di atas diperoleh estimator β_0 = 1,442; pendidikan kepala rumah tangga (β_1) = 1,310; variabel jumlah anggota rumahtangga (β_2)=0,037, variable etos kerja (β_3)=0,772, variable status pekerjaan (β_4) = 0,425; dan variabek kredit usaha (β_5) = 0,206 yang ditentukan dengan memakai metode estimasi kecenderungan maksimal, dengan pengertian hasil atau nilai yang diobservasi mempunyai kecenderungan maksimal.

Jika variabel pendidikan kepala rumah tangga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 1,310 meningkat satu kali sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga berpendidikan SLTP kebawah di Kabupaten Dharmasraya yang rumah tangganya berpeluang miskin sebesar 94,00 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel pendidikan kepala rumah tangga dari hasil perhitungan regresi logistik sebesar 3,707. Artinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTP kebawah di Kabupaten Dharmasraya

yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 3,707 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas.

Selanjutnya, jika variabel jumlah anggota rumah tangga yang mempunyai koefisien regresi sebesar 0,037 meningkat satu kali sementara variabel lainnya tidak berubah, maka proporsi rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dengan jumlah anggota rumahtangga 5 orang atau lebih berpeluang miskin sebesar 81,44 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel jumlah anggota rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,037. Artinya, kemungkinan rumah tangga dengan jumlah anggota rumahtangga 5 orang lebih yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 1,037 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang jumlah anggota rumahtangganya 1-4 orang.

Selanjutnya, jika variabel etos kerja kepala rumah tangga yang menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,772 meningkat satu kali sementara variabel lainnya tidak berubah, maka proporsi rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dengan etos kerja yang rendah rumah tangganya berpeluang miskin sebesar 90,15 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel etos kerja kepala rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 2,165. Artinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang etos kerjanya rendah yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 2,165 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang etos kerjanya tinggi.

Dengan koefisien regresi variable status pekerjaan 0,425 mengandung arti jika variabel status pekerjaan kepala rumah tangga meningkat satu kali sementara variabel lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dengan status pekerjaan informal yang rumah tangganya perpeluang miskin sebesar 86,61 persen (lihat lampiran).

Sementara itu, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel status pekerjaan kepala rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,529. Artinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang status pekerjaannya informal yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 1,529 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang status pekerjaannya formal.

Variabel kredit usaha mempunyai koefisien regresi sebesar 0,206. Jika variabel kredit usaha bertambah 1 kali sementara variabel bebas lainnya tidak berubah, maka proporsi kepala rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha yang rumah tangganya berpeluang miskin adalah sebesar 83,86 persen (lihat lampiran).

Selanjutnya, nilai *Odds Ratio* (OR) variabel kredit usaha dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,229. Nilai tersebut selanjutnya dapat diartikan kemungkinan/peluang rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 1,229 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang menerima kredit usaha.

5.7 Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini menemukan kenyataan bahwa kelima variabel seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumahtangga, etos kerja kepala rumahtangga, status pekerjaan kepala rumah tangga, dan kredit usaha berpengaruh terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya.

Variabel pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang berpendidikan rendah (SLTP kebawah) cenderung rumah tangganya miskin sebesar 3,707 kali dibanding kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting terutama dalam meningkatkan kreativitas penduduk agar dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Perubahan perilaku juga merupakan proses dari hasil pendidikan. Dengan pendidikan akan terjadi perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan (guna meningkatkan pendapatan), perubahan sikap serta berubahnya norma-norma yang dipakai masyarakat.

Sementara itu, variabel jumlah anggota rumah tangga dari hasil penelitian tampaknya juga memberikan pengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya walaupun tidak signifikan tetapi berpengaruh positif. Hal ini ditunjukan dengan koefisien regresi yang positif serta nilai *Odds Ratio* sebesar 1,037. Temuan tersebut memberikan indikasi bahwa jumlah anggota rumah tangga yang

menjadi tanggung jawab rumah tangga terbukti sangat berpengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga cukup banyak cenderung rumah tangganya menjadi miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anggota rumah tangga maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tersebut. Dengan kondisi tingkat pendapatan rumah tangga yang belum meningkat maka jumlah anggota rumah tangga yang besar akan menjadi penyebab utama dalam membentuk kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya untuk variabel etos kerja, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etos kerja juga signifikan terhadap pembentukan rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini ditandai dengan koefisien regresi variabel status pekerjaan sebesar 0,772 serta nilai *Odds Ratio* 2,165. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya juga dapat dipengaruhi oleh etos kerja yang disandang oleh kepala rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Untuk status pekerjaan juga berpengaruh signifikan terhadap terbentuknya rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja pada sector informal, memiliki kecendrungan untuk menjadi miskin sebesar 1,529 kali dengan kondisi ini dapat dilihat bahwa sector informal juga menjadi salah satu penyebab dalam membentuk kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

Pada kasus kredit usaha memiliki pengaruh terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan

nilai *Odds Ratio* sebesar 1,229. Yang dapat diartikan bahwa peluang rumah tangga yang tidak menerima kredit untuk menjadi miskin sebanyak 1,229 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang menerima kredit usaha. Dari temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya juga dapat dipengaruhi oleh kredit usaha yang diterima kepala rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya.

5.8. Implikasi Kebijakan

Dengan adanya temuan ini maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan kepala rumah tangga khususnya dan pendidikan masyarakat pada umumnya merupakan variabel yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dengan terbuktinya variabel pendidikan menjadi urutan pertama dengan nilai *Odds Ratio* 3,707 yang berpengaruh kuat terhadap terbentuknya rumah tangga miskin hal ini hendaknya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah terutama dalam meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya hendaknya dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokus kepada generasi berikutnya. Hasil temuan ini cocok dengan hasil penelitian "Yossi Windria, pada tahun 2010" yang menyatakan Hanya dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan anggaran pembangunan pada sektor pendidikan diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada masa yang akan datang, serta masih perlu adanya pengawasan dan pembentukan sistem pendidikan yang aktif dan efektif. Hal senada juga ditemukan pada hasil

penelitian "Rino Haryanto pada tahun 2008" yang menyatakan perlunya pembangunan di bidang pendidikan dengan cara mengajak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah untuk bersekolah kembali dengan tanpa biaya pendidikan. Dan juga lebih menggiatkan lagi program wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun khususnya di daerah pedesaan yang masih banyak jumlah penduduk miskinnya.

Berkaitan dengan masalah etos kerja dan status pekerjaan, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Dharmasraya masih banyak yang melakukan pekerjaan pada jalur informal. Selain itu, masih banyak juga penduduk yang bekerja dengan rata-rata jumlah jam kerja perminggu dibawah jam kerja normal yakni dibawah 35 jam perminggu. Kondisi tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan waktu bekerja seoptimal mungkin agar produktivitas yang dihasilkan dapat lebih meningkatkan lagi.

Dengan meningkatnya produktivitas diharapkan pendapatan rumah tangga juga akan mengalami peningkatkan dan pada akhirnya kebutuhan rumah tangga yang paling mendasar akan dapat dipenuhi sehingga mereka dapat hidup diatas garis kemiskinan. Pembukaan lapangan pekerjaan formal juga hendaknya menjadi bahan pemikiran pada masa yang akan datang.

Variable kredit usaha menjadi variable ke 4 yang berpengaruh terhadap penyebab kemiskinan. Untuk itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dengan adanya bantuan permodalan melalui kredit usaha. Hasil temuan ini ditemukan kecocokan dengan temuan " Fitriasih, pada tahun 2008" yang menyatakan upaya

untuk memperdayakan kegiatan produktif masyarakat miskin yang dibutuhkan adalah kemudahan ekonomi (economic facilities) yang memihak kepada masyarakat miskin. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyrkat miskin terhadap berbagai sumber permodalan.

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, walaupun dalam penelitian ini variable jumlah anggota rumah tangga tidak memberikan peluang yang berarti terhadap kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya namun salah satu program yang masih dijalankan oleh pemerintah adalah Keluarga Berencana (KB) tetap harus dilaksanakan demi kepentingak dimasa yang akan datang dengan motto "dua anak lebih baik". Penekanan terhadap jumlah anggota rumah tangga juga membawa dampak terhadap penekanan anggaran pengeluaran rumah tangga. Pameo lama yang menyatakan "banyak anak banyak rezeki" sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenyataannya, semakin banyak anak yang menjadi tanggungan keluarga maka akan semakin banyak pula biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Terbentuknya rumah tangga/keluarga miskin hasil penelitian ini salah satunya disebabkan jumlah anggota rumah tangga yang cukup banyak, sehingga sosialisasi untuk menekan jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupaten Dharmasraya menjadi hal yang paling cocok guna membentuk keluarga kecil yang sejahtera pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan dan pengefektifan program Keluarga Berencana (KB). Temuan ini cocok dengan penelitian "Rino Haryanto, pada tahun 2008" yang menyatakan laju pertumbuhan populasi penduduk perlu dikendalikan secara lebih efektif, untuk itu perlu kiranya lebih menggiatkan lagi program Keluarga Berencana (KB) yang elah dilaksanankan

pada Orde Baru terutama untuk daerah Kabupaten tepanya di Daerah pedesaan yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak dan masih kurang pengetahuan dan pemahaman tentang program Keluarga berencana.

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendidikan kepala rumah tangga berpeluang terhadap terbentuknya rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Dengan pendidikan kepala rumah tangga yang **rendah** kecenderungan rumah tangganya miskin sebesar 3,707 kali dibandingkan kepala rumah tangga yang berpendidikan **tinggi**.
2. Jumlah anggota rumah tangga tidak berpeluang signifikan terhadap terbentuknya rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya, dimana jika jumlah anggota rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistic sebesar 1,037. Artinya, kemungkinan rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga 5 orang atau lebih yang rumah tangganya miskin adalah sebesar 1,037 kali dibandingkan dengan rumahtangga yang tidak masuk kategori.
3. Etos kerja berpeluang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya. Nilai *Odds Ratio* variabel etos kerja kepala rumah tangga dari hasil penghitungan regresi logistic sebesar 2,165. Atinya, kemungkinan kepala rumah tangga yang etos kerjanya rendah cendrung menjadi miskin 2,165 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang etos kerjanya tinggi.
4. Status pekerjaan kepala rumah tangga juga bepeluang terhadap pembentukan rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini ditandai dengan

koefisien regresi variabel status pekerjaan sebesar 0,425 serta nilai *Odds Ratio* 1,529. Kepala rumah tangga yang bekerja **informal** cenderung menjadi miskin 1,529 kali dibanding kepala rumah tangga yang bekerja **formal**.

5. Kredit usaha juga berpeluang terhadap kemiskinan, variable kredit usaha dari hasil penghitungan regresi logistik sebesar 1,229. Artinya, peluang rumah tangga yang tidak menerima kredit usaha umtuk menjadi miskin sebesar 1,229 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang menerima kredit usaha.
6. Secara bersana-sama tingkat pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, etos kerja, status pekerjaan, dan kredit usaha berpeluang positif tetapi tidak seluruh variabel yang berpeluang signifikan dalam pembentukan rumah tangga miskin di Kabupaten Dharamasraya.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya hendaknya dapat dimulai dengan adanya perbaikan tingkat pendidikan masyarakat terutama difokuskan kepada generasi muda. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan anggaran pembangunan sektor pendidikan dan diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada masa yang akan datang.
2. Walaupun dalam penelitian ini jumlah anggota rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, tetapi masyarakat tetap harus memikirkan untuk kedepannya. Disarankan agar sosialisasi untuk menekan

jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupaten Dharmasraya tetap menjadi pekerjaan prioritas guna membentuk keluarga kecil yang sejahtera pada masa yang akan datang.

3. Di Kabupaten Dharmasraya juga banyak masyarakat yang memiliki jam kerja dibawah 35 jam perminggu. Keadaan ini diharapkan akan terus mengalami perbaikan dalam etos kerja masyarakat, walaupun merupakan hal yang sedikit sulit mengingat semua perubahan etos kerja seseorang tergantung keinginan dan kesadaran orang yang bersangkutan. Hendaknya ada kesadaran dari masyarakat untuk lebih meningkatkan jam kerja agar pendapatan mereka meningkat. Diperlukannya peranan pemerintah seperti diberikannya penyuluhan mengenai pengetahuan tentang jam kerja yang sesungguhanya serta program-program lain yang dapat memicu serta meningkatkan etos kerja masyarakat sendiri dengan jumlah jam kerja yang makin meningkat.
4. Berkaitan dengan masalah status pekerjaan, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Dharmasraya masih banyak melakukan pekerjaan pada jalur informal. Kondisi tersebut hendaknya dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah terutama dalam melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan waktu bekerja seoptimal mungkin agar produktivitas yang dihasilkan dapat meningkat lebih baik. Disarankan juga agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong pihak swasta untuk dapat membuka lapangan pekerjaan formal baru. Selain itu pengadaan pelatihan-pelatihan keterampilan yang ditambah dengan suatu bentuk acara motivasi dalam bekerja sekiranya dapat juga mengoptimalkan produktivitas masyarakat.

5. Kredit usaha merupakan salah satu variable yang dari banyak variable yang berpengaruh signifikan terhadap penyebab kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, hendaknya pemerintah memberikan kredit dengan bunga yang rendah agar mereka bisa membuka usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatannya dan pinjaman untuk modal usaha dikembalikan setelah mereka mendapatkan keuntungan
6. Berkaitan dengan penelitian ini, masih terdapat banyak kekurangannya. Peneliti menilai bahwa penelitian ini sangat menarik dan penting untuk diteliti kembali mengapa dengan program kemiskinan yang terus ditingkatkan dan dengan dana realisasi program yang terus ditambah anggarannya tapi jumlah penduduk miskin masih sulit diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afkar.1999. *Analisis Manfaat Social Ekonomi Program Pembinaan Masyarakat Desa hutan.*Pps.Unand Padang

Anwar, Arsjad, Ikhsan. 1995. *Sumber Daya teknologi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Asnawi, S. 1994. *Masalah Kemiskinan di Pedesaan dan Strategi Penanggulangannya Makalah seminar Pengentasan Kemiskinan.* Padang: Kerjasama Dengan Universitas Bung hatta 10 Januari 1994.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Dharmasraya dalam Angka 2004*. Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya

_____. 2005. *Dharmasraya Dalam Angka 2005.* Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya.

_____. 2006. *Dharmasraya Dalam Angka 2006.* Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya.

_____. 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2005 dan 2006.* Jakarta: BPS.

_____. 2007. *Survei Angkatan Kerja Nasional 2007*. Jakarta: BPS.

_____. 2007. *Dharmasraya Dalam Angka 2007.* Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya.

_____. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta: BPS

_____. 2008. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008*. Jakarta: BPS.

_____. 2008. *Dharmasraya Dalam Angka 2008.* Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya.

_____. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta: BPS

_____. 2009. *Survei Sosial ekonomi Nasional 2009*. Jakarta: BPS

_____. 2010. *Dharmasraya dalam Angka 2010.* Dharmasraya: BPS Kabupaten Dharmasraya

Batubara, Marwan, et al. *BLBI Ramai-ramai Merampok Negara. (*Jakarta: Haekal Media center, 2008)

Elfindri. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Padang: Universitas Andalas.

Esmara, Hendra. 1986. *Distribusi Pendapatan Penduduk Indonesia*. Padang: Lembaga penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Firdaus, Carunia. 2004. *Situasi ketenagakerjaan dan Kebijakan Ekonomi Mengatasi Pengangguran*. Jakarta: P2E-LIPI

Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Hasbullah. 2003. *Edisi I Resume Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Cetakan Ke-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hasibuan, Malayu SP. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan, Edisi Revisi Cetakan Ke-1*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Http://mybase-blogspot.com/2010/04/menanggulangi-kemiskinan-mendorong.html

Http://baltasar-t.blogspot.com/2008-12-01-archive.html

Http://data.menkokesra.go.id/content/perkembangan-jumlah-penduduk-miskin-tahun-1976-2009-mds

Http://www.bi.go.id/NR/rdonlines/DD3BFBD-3879-45FD-A30E-30E4E5AD5B4/18325/suplemen4.pdf

Http://www.posindonesia.co.id/promo/foto2007/etos.pdf

Huff, Darerl. 2002. *Berbohong dengan Statistik.* Jakarta: Gramedia

Kholis, Nur 2003. *"Investasi Pendidikan : Dilema Imbal Balik dari Investasi Humass Capital".*

Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mubyarto, Awan Santosa, *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan,* Jurnal ekonomi rakyat, Mei 2003.

Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prayitno. 1987. *Petani desa dan Kemiskinan.* BPEE Jakarta

Soedjono, M. 1998. *Pembawa Keberhasilan IDT.* Jakarta: Bapenas

Suparlan. 1994. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Perubahan Sosial dan Kebijaksanaan social.* Daswarsa Pengembangan Propinsi daerah Tingkat 1 sumatera barat kerjasama Dengan Universitas Bung Hatta.

Tambunan, Tulus. *Apakah Pertumbuhan di Sektor Pertanian Sangat Krusial Bagi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia?,* Kadin Indonesia Jetro.2006.http//www.kadin-indonesia.or.id

Taufik, Iman. 2008. *Jadi Kuli di Negara sendiri.* Jakarta: Papar Sinar Sinanti

Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi edisi kelima.* Jakarta: Bumi aksara.

Widiawati, Diah (1994). *Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi.* Warta Demografi, Tahun ke-24 No.5

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PELUANG

No	Rumah Tangga Miskin				
	Variabel	Konstanta	Koef. Regresi	Y = Ln(p/1-p)	Proporsi Exp (Y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat Pendidikan	1.442	1.310	2.752	94.00
2	Jumlah Anggota Rumahtangga	1.442	0.037	1.479	81.44
3	Etos Kerja	1.442	0.772	2.214	90.15
4	Status Pekerjaan	1.442	0.425	1.867	86.61
5	Kredit Usaha	1.442	0.206	1.648	83.86

Variables in the Equation

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
DIDIK	1.310	.061	468.113	1	.000	3.707
JART	.037	.034	1.140	1	.286	1.037
ETOS	.772	.037	440.142	1	.000	2.165
STATUS	.425	.046	83.821	1	.000	1.529
KREDIT	.206	.097	4.532	1	.033	1.229
Constant	1.442	.098	217.449	1	.000	4.230

Kemiskinan Rumahtangga (Y) * Pendidikan Kepala Keluarga (X1) Crosstabulation

			Pendidikan Kepala Keluarga (X1)		
			SLTP Ke bawah	SLTA Ke atas	Total
Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	Count	3756	323	4079
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	92.1%	7.9%	100.0%
		% of Total	8.7%	.7%	9.4%
	Tidak Miskin	Count	28585	10755	39340
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	72.7%	27.3%	100.0%
		% of Total	65.8%	24.8%	90.6%
Total		Count	32341	11078	43419
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	74.5%	25.5%	100.0%
		% of Total	74.5%	25.5%	100.0%

Kemiskinan Rumahtangga (Y) * Jumlah Anggota Rumahtangga Crosstabulation

			Jumlah Anggota Rumahtangga		
			5 dan lebih	4 KE BAWAH	Total
Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	Count	1686	2393	4079
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	41.3%	58.7%	100.0%
		% of Total	3.9%	5.5%	9.4%
	Tidak Miskin	Count	14539	24801	39340
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	37.0%	63.0%	100.0%
		% of Total	33.5%	57.1%	90.6%
Total		Count	16225	27194	43419
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	37.4%	62.6%	100.0%
		% of Total	37.4%	62.6%	100.0%

Kemiskinan Rumahtangga (Y) * Jam Kerja Seminggu (X3) Crosstabulation

			Jam Kerja Seminggu (X3)		
			<35 jam	35 jam dan lebih	Total
Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	Count	2913	1166	4079
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	71.4%	28.6%	100.0%
		% of Total	6.7%	2.7%	9.4%
	Tidak Miskin	Count	20086	19254	39340
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	51.1%	48.9%	100.0%
		% of Total	46.3%	44.3%	90.6%
Total		Count	22999	20420	43419
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	53.0%	47.0%	100.0%
		% of Total	53.0%	47.0%	100.0%

Kemiskinan Rumahtangga (Y) * Status Pekerjaan (X4) Crosstabulation

			Status Pekerjaan (X4)		
			Informal	Informal	Total
Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	Count	3432	647	4079
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	84.1%	15.9%	100.0%
		% of Total	7.9%	1.5%	9.4%
	Tidak Miskin	Count	27207	12133	39340
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	69.2%	30.8%	100.0%
		% of Total	62.7%	27.9%	90.6%
Total		Count	30639	12780	43419
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	70.6%	29.4%	100.0%
		% of Total	70.6%	29.4%	100.0%

Kemiskinan Rumahtangga (Y) * Kredit Usaha Crosstabulation

			Kredit Usaha		
			Tidak Menerima Kredit Usaha	Menerima Kredit Usaha	Total
Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	Count	130	3949	4079
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	3.2%	96.8%	100.0%
		% of Total	.3%	9.1%	9.4%
	Tidak Miskin	Count	966	38374	39340
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	2.5%	97.5%	100.0%
		% of Total	2.2%	88.4%	90.6%
Total		Count	1096	42323	43419
		% within Kemiskinan Rumahtangga (Y)	2.5%	97.5%	100.0%
		% of Total	2.5%	97.5%	100.0%

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases[a]		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	608	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	608	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		608	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
tidak miskin	0
Miskin	1

Block 0: Beginning Block

Classification Table[a,b]

Observed			Predicted		
			Kemiskinan Rumahtangga (Y)		Percentage Correct
			Miskin	Tidak Miskin	
Step 0	Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	0	4079	.0
		Tidak Miskin	0	39340	100.0
	Overall Percentage				90.6

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	2.266	.016	18983.554	1	.000	9.645

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	DIDIK	733.416	1	.000
		JART	30.244	1	.000
		ETOS	614.803	1	.000
		STATUS	399.269	1	.000
		KREDIT	8.038	1	.005
	Overall Statistics		1354.406	5	.000

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1571.333	5	.000
	Block	1571.333	5	.000
	Model	1571.333	5	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	25484.907	.036	.077

Classification Table[a]

			Predicted		
			Kemiskinan Rumahtangga (Y)		Percentage Correct
	Observed		Miskin	Tidak Miskin	
Step 1	Kemiskinan Rumahtangga (Y)	Miskin	0	4079	.0
		Tidak Miskin	0	39340	100.0
	Overall Percentage				90.6

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1(a)	DIDIK	1.310	.061	468.113	1	.000	3.707
	JART	.037	.034	1.140	1	.286	1.037
	ETOS	.772	.037	440.142	1	.000	2.165
	STATUS	.425	.046	83.821	1	.000	1.529
	KREDIT	.206	.097	4.532	1	.033	1.229
	Constant	1.442	.098	217.449	1	.000	4.230

a Variable(s) entered on step 1: DIDIK, JART, ETOS, STATUS, KREDIT.

Correlation Matrix

		Constant	DIDIK	JART	ETOS	STATUS	KREDIT
Step 1	Constant	1.000	-.045	-.193	-.071	-.013	-.957
	DIDIK	-.045	1.000	-.044	.009	-.192	.015
	JART	-.193	-.044	1.000	-.034	-.099	.000
	ETOS	-.071	.009	-.034	1.000	-.139	-.027
	STATUS	-.013	-.192	-.099	-.139	1.000	-.020
	KREDIT	-.957	.015	.000	-.027	-.020	1.000

Yr: Bps Dharmasraya.

BADAN PUSAT STATISTIK

VSEN2009.K
Dibuat 1 set untuk
BPS Kab/Kota

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2009

KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
[SUSENAS JULI 2009]

AHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT

1	Provinsi		☐☐
2	Kabupaten/Kota*)		☐☐
3	Kecamatan		☐☐☐
4	Desa/Kelurahan*)		☐☐☐
5	Klasifikasi desa/kelurahan	*1. Perkotaan* *2. Perdesaan*	☐
6	Letak geografis desa/kelurahan	*1. Pesisir* *2. Bukan Pesisir*	☐
7	a. Nomor blok sensus		
	b. Nomor sub blok sensus (nomor segmen)		
8	Nomor kode sampel		☐☐☐☐
9	Nomor urut sampel rumah tangga		☐☐
10	Nama kepala rumah tangga		
11	Alamat (nama jalan/gang, RT/RW/dusun)		

II. RINGKASAN DARI BLOK IV

1	Banyaknya anggota rumah tangga		☐☐
2	Banyaknya anggota rumah tangga umur 0 – 4 tahun		☐
3	Banyaknya anggota rumah tangga umur 5 tahun ke atas		☐☐
4	Banyaknya anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas		☐☐

III. KETERANGAN PETUGAS

1	Nama dan NIP Pencacah:	☐☐☐☐☐	5	Nama dan NIP Kortim:	☐☐☐☐☐
2	Jabatan Pencacah: *1. Staf BPS Provinsi* *3. KSK* *2. Staf BPS Kab/Kota* *4. Mitra*	☐	6	Jabatan Kortim: *1. Staf BPS Provinsi* *3. KSK* *2. Staf BPS Kab/Kota* *4. Mitra*	☐
3	Tanggal pencacahan:	Tanggal ☐☐ Bulan ☐☐	7	Tanggal pemeriksaan:	Tanggal ☐☐ Bulan ☐☐
4	Tanda tangan Pencacah:		8	Tanda tangan Kortim:	

*) Coret yang tidak perlu

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

Nama anggota rumah tangga (art) (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rt ini, baik dewasa, anak-anak maupun bayi)	Hubungan dengan kepala rumah tangga (kode)	Jenis kelamin 1. Lk 2. Pr	Umur (tahun)	Status perkawinan (kode)	Apakah menjadi korban kejahatan dalam **setahun terakhir?** (kode)	Jika **Kol (7) berkode 1 sd 6,** Apakah dilaporkan ke Polisi? 1. Ya 2. Tidak	Berapa kali bepergian selama periode **1 April – 30 Juni 2009?**) **Jika tidak bepergian isikan "00"**	Jika **Kol (9) ≠ 00,** Tujuan utama bepergian yang terakhir (kode)	**Art 0 – 6 Tahun**	
									Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah? 1. Ya, pernah 2. Ya, sedang 3. Tidak	Jika **Kol (11)** berkode 1 atau 2, jenis pendidikan pra sekolah (kode)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1									

Kode Kolom (3):
Hubungan dengan kepala rt

1. *Kepala rt*
2. *Istri/suami*
3. *Anak*
4. *Menantu*
5. *Cucu*
6. *Orang tua/mertua*
7. *Famili lain*
8. *Pembantu rt*
9. *Lainnya*

Kode Kolom (6):
Status perkawinan

1. *Belum kawin*
2. *Kawin*
3. *Cerai hidup*
4. *Cerai mati*

Kode Kolom (7):
Jenis kejahatan

1. *Ya, pencurian*
2. *Ya, perampokan*
3. *Ya, pembunuhan*
4. *Ya, penipuan*
5. *Ya, perkosaan*
6. *Ya, lainnya*
7. *Tidak*

Kode Kolom (10):
Tujuan utama bepergian yang terakhir

1. *Berlibur/rekreasi*
2. *Profesi/bisnis*
3. *Misi/pertemuan/kongres*
4. *Pendidikan/pelatihan*
5. *Kesehatan*
6. *Berziarah/keagamaan*
7. *Mengunjungi teman/ keluarga*
8. *Olahraga/kesenian*
9. *Lainnya*

Kode Kolom (12):
Pendidikan pra sekolah **)

1. *TK/BA/RA*
2. *Kelompok Bermain*
3. *Taman Penitipan Anak*
4. *Pos PAUD/ PAUD terintegrasi BKB/ Posyandu*
5. *Satuan PAUD Sejenis lainnya (PAUD-TAAM, PAUD-SM, PAUD-BIA& PAUD Lembaga lainnya)*

Setiap selesai mencatat art di Kolom 2 dan Kolom 3 tanyakan sekali lagi apakah ada nama-nama yang terlewat seperti bayi yang baru lahir, art yang sementara bepergian dan pembantu yang tinggal bersama. Jika ada, masukkan dalam daftar. Sementara itu untuk art yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih tidak dianggap sebagai art, keluarkan dalam daftar, urutkan kembali nomor urut yang ada di Kolom 1.

eterangan:

*) **Art yang bepergian**: Melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan 100 km dan lebih (p.p), tidak termasuk pelaju (commuter), sekolah dan bekerja

) **PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini

- PAUD terintegrasi BKB: PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita
- PAUD – SM: PAUD - Sekolah Minggu
- PAUD – TAAM: PAUD - Taman Asuh Anak Muslim
- PAUD – BIA: PAUD - Bina Iman Anak Katolik

V. KETERANGAN PERORANGAN TENTANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN, SERTA FERTILITAS DAN KB

Nama: ..... No. urut: ..... ☐☐

No. urut ibu kandung: ..... ☐☐
[Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rt ini]

Pemberi informasi:
Nama: ..... No. urut: ..... ☐☐

V.A. KETERANGAN KESEHATAN (UNTUK SEMUA UMUR)

1. Apakah dalam **1 bulan terakhir** mempunyai keluhan kesehatan seperti di bawah ini? **(Bacakan dari a s.d. h)**
[Isikan kode 1 bila ada, kode 2 bila tidak ada]

a. Panas	☐	e. Diare/buang[2] air	☐
b. Batuk	☐	f. Sakit kepala berulang	☐
c. Pilek	☐	g. Sakit gigi	☐
d. Asma/napas sesak/cepat	☐	h. Lainnya*)	☐

[Jika semua R.1 = 2, lanjutkan ke R.7]

2. Kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.4.a]**

3. Lamanya terganggu: ..... hari ☐☐

4. a. Apakah pernah mengobati sendiri dalam **1 bulan terakhir?** ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.5]**

b. Jenis obat/cara pengobatan yang digunakan:
[Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak]
1. Tradisional ☐ 2. Modern ☐ 3. Lainnya ☐

5. Apakah pernah berobat jalan dlm **1 bulan terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.7]**

6. Berapa kali berobat jalan selama **1 bulan terakhir**:
[Isikan frekuensi berobat jalan untuk setiap fasilitas]

a. RS Pemerintah	☐☐	e. Praktek nakes	☐☐
b. RS Swasta	☐☐	f. Praktek batra	☐☐
c. Praktek dokter/poliklinik	☐☐	g. Dukun bersalin	☐☐
d. Puskesmas/Pustu	☐☐	h. Lainnya	☐☐

7. Apakah pernah rawat inap dalam **1 tahun terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.9.a]**

8. Lamanya hari rawat inap (dalam hari):

a. RS Pemerintah	☐☐☐	d. Praktek nakes	☐☐☐
b. RS Swasta	☐☐☐	e. Praktek batra	☐☐☐
c. Puskesmas	☐☐☐	f. Lainnya	☐☐☐

V.B. KESEHATAN BALITA (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)

9. a. Umur dalam bulan: ..... *bulan* ☐☐
(ke **R.10** bila isian ≠ **00**)

b. Jika **R.9.a = 00**, umur dalam hari: ..... *hari* ☐☐

*) Misalnya: Campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, kecelakaan, dll.

10. Siapa yang menolong proses kelahiran? **Pertama** a ☐ **Terakhir** b ☐
[Isikan kode jawaban langsung ke kotak]

1. Dokter	*4. Dukun bersalin*
2. Bidan	*5. Famili/keluarga*
3. Tenaga paramedis lain	*6. Lainnya*

11. Berapa kali sudah mendapat imunisasi?
[Isikan 0, bila belum pernah diimunisasi]

a. BCG	☐	d. Campak/Morbili	☐
b. DPT	☐	e. Hepatitis B	☐
c. Polio	☐		

12. a. Apakah pernah diberi Air Susu Ibu (ASI)? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[Art lain]**

b. Jika "Ya" **(R.12.a=1)**, lama pemberian ASI:
[Isikan dalam "hari" bila umur < 1 bulan dan dalam "bulan" bila umur ≥ 1 bulan]:

1. Lama pemberian ASI:	1 ☐☐
2. ASI saja:	2 ☐☐
3. ASI dengan makanan pendamping:	3 ☐☐

V.C. KETERANGAN PENDIDIKAN (UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS)

13. Partisipasi bersekolah: ☐
1. Tidak/belum pernah bersekolah ➡ **[R.17]**
2. Masih bersekolah
3. Tidak bersekolah lagi

14. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki: ☐☐

01. SD/SDLB	*07. SMK*
02. M. Ibtidaiyah	*08. D_1/D_2*
03. SMP/SMPLB	*09. D_3/Sarjana Muda*
04. M. Tsanawiyah	*10. D_4/S_1*
05. SMU/SMLB	*11. S_2/S_3*
06. M. Aliyah	

15. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: ☐
1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)

16. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki: ☐☐

01. Tidak Punya Ijazah SD	*07. M. Aliyah*
02. SD/SDLB	*08. SMK*
03. M. Ibtidaiyah	*09. D_1/D_2*
04. SMP/SMPLB	*10. D_3/Sarjana Muda*
05. M. Tsanawiyah	*11. D_4/S_1*
06. SMU/SMLB	*12. S_2/S_3*

17. Dapat membaca dan menulis:
[Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak]

a. Huruf Latin	☐	c. Huruf lainnya	☐
b. Huruf Arab	☐		

HANYA UNTUK ART BERUMUR 5 - 24 TAHUN

8. **Jika R.13 = 1 atau 3**, alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi: ☐☐

01. Tidak ada biaya
02. Bekerja/mencari nafkah
03. Menikah/mengurus rt
04. Merasa penddk cukup
05. Belum cukup umur
06. Malu karena ekonomi
07. Sekolah jauh
08. Cacat
09. Menunggu pengumuman
10. Tidak diterima
11. Lainnya

19. **Jika R. 13 = 3**, kapan berhenti bersekolah?
[Isikan '00 dan 0000' bila berhenti sebelum tahun 1999]

Bulan: ..... ☐☐ Tahun: ..... ☐☐☐☐

V.D. KETENAGAKERJAAN (UNTUK ART BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS)

20. a. Apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini selama **seminggu terakhir**?

1. Bekerja	*1. Ya*	*2. Tidak*	1 ☐
2. Sekolah	*1. Ya*	*2. Tidak*	2 ☐
3. Mengurus rt	*1. Ya*	*2. Tidak*	3 ☐
4. Lainnya selain kegiatan pribadi *)	*1. Ya*	*2. Tidak*	4 ☐

[Jika R.20.a.1 s.d. 4 = 2, lanjutkan ke R.21]

b. Dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yg menyatakan "Ya", kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama **seminggu terakhir**? ☐
1 2 3 4
[Jika R.20.a.1 = 1, lanjutkan ke R.22]

21. Apakah mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tdk bekerja selama **seminggu terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak

22. Apakah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha selama **seminggu terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak

HANYA UNTUK ART YANG BEKERJA [R.20.a.1 = 1 atau R.21 = 1]

23. a. Jumlah hari kerja: ..... hari ☐

b. Jumlah jam kerja dari **seluruh pekerjaan seminggu terakhir**: ..... jam ☐☐

24. Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama **seminggu terakhir**: ☐☐

01. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan
02. Pertambangan dan penggalian
03. Industri pengolahan
04. Listrik, gas, dan air minum
05. Konstruksi
06. Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi
07. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
08. Lembaga Keuangan, real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
09. Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan
10. Lainnya

*) Yang termasuk kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi, misal: olah raga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti).

25. Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama **seminggu terakhir**: ☐

1. *Berusaha sendiri*
2. *Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar*
3. *Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar*
4. *Buruh/karyawan/pegawai*
5. *Pekerja bebas*
6. *Pekerja tidak dibayar*

V.E. FERTILITAS & KELUARGA BERENCANA (UNTUK WANITA BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS)

WANITA BERSTATUS KAWIN, CERAI HIDUP, CERAI MATI (Blok IV, Kolom 4 = 2 & Kolom 6 = 2, 3, atau 4)

26. Umur pada saat perkawinan pertama: ..... *tahun* ☐☐

27. Jumlah tahun dlm ikatan perkawinan: ..... *tahun* ☐☐

28. Jumlah anak kandung (a.k.) yang dilahirkan:	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
a. A.k. lahir hidup	☐☐	☐☐	☐☐
b. A.k. masih hidup	☐☐	☐☐	☐☐
c. A.k. sudah meninggal	☐☐	☐☐	☐☐

29. Penggunaan/pemakaian alat/cara KB: ☐

1. *Sedang menggunakan*
2. *Tidak menggunakan lagi* } **R.31**
3. *Tidak pernah menggunakan* }

30. Jika sedang menggunakan **(R.29=1)**, alat/cara KB yang sedang digunakan/dipakai: ☐

1. *MOW/tubektomi*
2. *MOP/vasektomi*
3. *AKDR/IUD/spiral*
4. *Suntikan KB*
5. *Susuk KB/norplan/ implanon/alwalit*
6. *Pil KB*
7. *Kondom/karet KB*
8. *Intravag/tisue/kondom wanita*
9. *Cara tradisional*

[Lanjutkan ke art lain]

31. Bagi yang tidak ber-KB **(R.29=2 atau 3)**, apakah (masih) ingin punya anak? ☐

1. *Ya, segera (< 2 tahun)* ➔ **[Art lain]**
2. *Ya, kemudian (≥ 2 tahun)*
3. *Tidak*

32. **Jika R.31 = 2 atau 3**, alasan utama tidak ber-KB: ☐

1. *Alasan fertilitas*
2. *Menentang utk memakai*
3. *Kurang pengetahuan*
4. *Alasan alat/cara KB*
5. *Lainnya (.....)*
6. *Tidak tahu*

VI. KETERANGAN PERUMAHAN

1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati: ☐
   1. Milik sendiri *5. Dinas*
   2. Kontrak *6. Milik orang tua/sanak/ saudara*
   3. Sewa *7. Lainnya*
   4. Bebas sewa
2. Jenis atap terluas: ☐
   1. Beton *5. Asbes*
   2. Genteng *6. Ijuk/rumbia*
   3. Sirap *7. Lainnya*
   4. Seng
3. Jenis dinding terluas: ☐
   1. Tembok *3. Bambu*
   2. Kayu *4. Lainnya*
4. Jenis lantai terluas: ☐
   1. Bukan tanah *2. Tanah*
5. Luas lantai: ..... m^2 ☐☐☐
6. a. Sumber air minum: ☐☐
   01. Air kemasan bermerk ➡[R.8]
   02. Air isi ulang ➡[R.8]
   03. Leding meteran ➡ [R.7]
   04. Leding eceran ➡ [R.8]
   05. Sumur bor/pompa
   06. Sumur terlindung
   07. Sumur tak terlindung
   08. Mata air terlindung
   09. Mata air tak terlindung
   10. Air sungai
   11. Air hujan
   12. Lainnya
   } *[R.7]*
   b. Jika **R.6.a = 05 s.d. 09** (pompa/sumur/mata air) jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat: ☐
   1. < 10 m *3. Tidak tahu*
   2. ≥ 10 m
7. Jika **R.6.a =03, 05 s.d. 12** penggunaan fasilitas air minum: ☐
   1. Sendiri *3. Umum*
   2. Bersama *4. Tidak ada*
8. Cara memperoleh air minum: ☐
   1. Membeli *2. Tidak membeli*
9. a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: ☐
   1. Sendiri *3. Umum*
   2. Bersama *4. Tidak ada ➡ [R.9.c]*
   b. Jenis kloset: ☐
   1. Leher angsa *3. Cemplung/cubluk*
   2. Plengsengan *4. Tidak pakai*
   c. Tempat pembuangan akhir tinja: ☐
   1. Tangki/SPAL *4. Lubang tanah*
   2. Kolam/sawah *5. Pantai/tanah lapang/ kebun*
   3. Sungai/danau/ laut *6. Lainnya*
10. a. Sumber penerangan: ☐
    1. Listrik PLN *4. Pelita/sentir/obor*
    2. Listrik non PLN *5. Lainnya*
    3. Petromak/aladin
    b. Jika **listrik PLN**, daya terpasang: ☐
    1. 450 watt *4. 2.200 watt*
    2. 900 watt *5. > 2.200 watt*
    3. 1.300 watt *6. Tanpa meteran*
11. Bahan bakar/energi utama untuk memasak: ☐
    1. Listrik *3. Minyak Tanah* *5. Kayu bakar*
    2. Gas/elpiji *4. Arang/briket* *6. Lainnya*

VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA

VII.A. PENGELUARAN UNTUK MAKANAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR [BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI, DAN PEMBERIAN]	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
1. **Padi-padian** a. Beras	
b. Lainnya (jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll).	
2. **Umbi-umbian** (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu,dll.)	
3. **Ikan/udang/cumi/kerang** a. Segar/ basah	
b. Asin/diawetkan	
4. **Daging** (daging sapi/kerbau/kambing/domba/ babi/ayam, jeroan, hati, limpa, abon, dendeng, dll)	
5. **Telur dan susu** a. Telur ayam/ itik/ puyuh	
b. Susu murni, susu kental, susu bubuk, dll.	
6. **Sayur-sayuran** (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll.)	
7. **Kacang-kacangan** (kacang tanah/hijau/ kedele/ merah/ tunggak/mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll.)	
8. **Buah-buahan** (jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll.)	
9. **Minyak dan lemak** (minyak kelapa/ goreng, kelapa, mentega, dll.)	
10. **Bahan minuman** (gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll.)	
11. **Bumbu-bumbuan** (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll.)	
12. **Konsumsi Lainnya** a. Mie instant, mie basah, bihun, makaroni/ mie kering.	
b. Lainnya (kerupuk, emping, dll.)	
13. **Makanan dan minuman jadi** a. **Makanan jadi** (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames, dll.)	
b. **Minuman non alkohol** (*soft drink*, es sirop, limun, air mineral, dll)	
c. **Minuman mengandung alkohol** (bir, anggur, dan minuman keras lainnya).	
14. **Tembakau dan sirih** a. Rokok (rokok kretek, rokok putih, cerutu)	
b. Lainnya (sirih, pinang, tembakau, dan lainnya)	
15. **Jumlah pengeluaran makanan** (Rincian 1 s.d 14)	

VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA (LANJUTAN)

VII.B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN (BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI DAN PEMBERIAN)	Sebulan Terakhir (Rp)	12 bulan Terakhir (Rp)
(1)	(2)	(3)
16. **Perumahan dan fasilitas rumah tangga**		
a. Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah (milik sendiri, bebas sewa, dinas), dan lain-lain		
b. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan		
c. Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll		
d. Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, internet, warnet, benda pos, dll		
17. **Aneka barang dan jasa**		
a. Sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tisu, dll		
b. Biaya kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan dan lainnya)		
c. Biaya Pendidikan (uang pendaftaran, SPP, komite sekolah, uang pangkal/ daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus dan lainnya)		
d. Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas		
e. Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu, rumah tangga, hotel, dll)		
18. **Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala** (pakaian jadi, bahan pakaian, sepatu, topi dan lainnya)		
19. **Barang tahan lama** (alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan (elektronik), alat olahraga, perhiasan, kendaraan, payung, arloji, kamera, HP, pasang telepon, pasang listrik, barang elektronik dll.)		
20. **Pajak, pungutan, dan asuransi**		
a. Pajak (PBB, pajak kendaraan)		
b. Pungutan/retribusi		
c. Asuransi Kesehatan		
d. Lainnya (Asuransi lainnya, tilang, PPh, dll)		
21. **Keperluan pesta dan upacara/kenduri tidak termasuk makanan** (perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat, dan lainnya).		
22. **Jumlah pengeluaran bukan makanan** (Rincian 16 s.d. Rincian 21)		
23. **Rata-rata pengeluaran makanan sebulan** (Rincian 15 x $\frac{30}{7}$)		
24. **Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan** ($\frac{\text{Rincian 22 Kolom 3}}{12}$)		
25. **Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan** (Rincian 23 + 24)		

26. **Sumber penghasilan terbesar rumah tangga** *(pilih dari art dengan penghasilan terbesar):* — [Diisi Kortim] ☐☐

a. Lapangan Usaha .....
(Tulis selengkap-lengkapnya)

b. Status Pekerjaan: *0. Penerima pendapatan* *1. Buruh/karyawan* *2. Pengusaha* — ☐

VIII. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI LAINNYA

Apakah tersedia jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap di bawah ini ?
[Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak]

a. JPK PNS/Veteran/Pensiun ☐
b. JPK Jamsostek ☐
c. Asuransi Kesehatan Swasta ☐
d. Tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan ☐
e. JPK MM/Kartu sehat/JPK gakin/kartu miskin/ kartu jamkesmas ☐
f. Dana sehat ☐
g. JPKM/JPK Lain ☐

a. Apakah ada anggota rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama **6 bulan terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.3]**

b. Jika "Ya" (**R.2.a=1**), kartu yang digunakan: ☐
1. Jamkesmas 3. Surat Miskin/SKTM
2. Kartu Sehat 4. Lainnya:
.....

Apakah rumah tangga ini penerima BLT 2008/2009? ☐
1. Ya 2. Tidak

a. Apakah rumah tangga pernah membeli beras murah untuk rumah tangga miskin **(raskin)** selama **3 bulan terakhir**? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.5.a]**

b. Jika "Ya" (**R.4.a= 1**), berapa kg beras raskin yang terakhir dibeli? ☐☐☐
..... *kg*

c. Berapa rupiah **per kg** yang dibayar oleh rumah tangga untuk membeli beras raskin **yang terakhir**? ☐☐☐☐
Rp .....

a. Apakah ada anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha dlm **setahun terakhir**? ☐
[Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak]

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ☐
2. Program pemerintah lainnya ☐
3. Program Bank ☐
4. Program Koperasi/ Yayasan ☐
5. Perorangan ☐
6. Lainnya (.....) ☐

b. Jika kredit usaha yang diterima lebih dari 1 jenis, mana yang terbesar? ☐
(Tuliskan salah satu kode kredit usaha, 1 s.d. 6 dari Rincian 5.a)

IX. TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Apakah di rumah tangga ini ada telepon rumah? ☐
1. Ya 2. Tidak

2. a. Apakah ada anggota rumah tangga yang menguasai telepon seluler (HP)? ☐
1. Ya 2. Tidak ➡ **[R.3]**

b. Jika "Ya", banyaknya anggota rumah tangga yang menguasai nomor HP yang aktif: ..... orang ☐☐

c. Jumlah nomor HP aktif yang dikuasai seluruh anggota rumah tangga: ..... nomor ☐☐

3. Apakah rumah tangga ini menguasai komputer?
[Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak]

a. Desktop/ PC ☐
b. Laptop/ Note book ☐

4. Penggunaan internet:

Lokasi/ Media Akses	Apakah ada art yang mengakses internet **sebulan terakhir**? *1. Ya 2. Tidak*	Jika "Ya", jumlah art yang mengakses (orang)
(1)	(2)	(3)
a. Rumah	☐	☐
b. Warnet	☐	☐
c. Kantor	☐	☐
d. Sekolah	☐	☐
e. Lainnya (Cafe, Hotel dsb)	☐	☐

X. CATATAN

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005,2006,2007, 2008 dan 2009

NO	Deskripsi	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	20,5	25,4	23,8	21,4	19.87
2	Persentase Penduduk Miskin	13,01	14,93	14,42	12,5	11.40
3	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	163818	169588	175.57	184.683	229,181

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan (Berbagai Edisi)

Dharmasraya sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat juga termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut hasil pengumpulan data oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Dharmasraya selama kurun waktu tahun 2005-2009 cukup berfluktuasi. Pada awalnya jumlah penduduk miskin di Dharmasraya pada tahun 2005 adalah 20,5 ribu jiwa artinya terdapat penduduk sebanyak 20.500 orang yang tidak mampu melewati batas garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Dharmasraya terjadi peningkatan dan tercatat sebanyak 25.400 jiwa. Pada tahun 2007, 2008, 2009 jumlah penduduk miskin terjadi penurunan dan tercatat pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 23.800 jiwa, tahun 2008 turun menjadi 21.400 jiwa, dan terakhir pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 19.87 jiwa.

Bila dilihat dari sector pekerjaan penduduk miskin kabupaten Dharmasraya Sector pertanian adalah sector yang paling banyak diandalkan oleh penduduk miskin dalam mendapatkan lapangan kerja sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Penduduk miskin di Kabupaten Dharmasrayapun mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan mereka, yang dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun keatas Menurut Sektor Bekerja tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008

NO	Deskripsi	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tidak Bekerja	13,56	9,24	3,89	1,74
2	Bekerja disektor Pertanian	65,44	71,97	61,68	69,97
3	Bekerja Bukan diSektor Pertanian	21,00	18,79	34,43	28,28

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan (Berbagai Edisi)

Secara umum Penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya bekerja disektor pertanian yaitu lebih dari 50 persen penduduknya, dimana pada tahun 2005 sebesar 65,44 persen dan meningkat pada tahun 2006 sebesar 71,97 persen, walaupun Dimana pada tahun 2007 penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha pada Pertanian terjadi penurunan menjadi 61,68 persen dan pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan kembali pada pososisi 69,97 persen, hal ini dapat

disimpulkan bahwa lebih dari setengah penduduk miskin di Kabupaten Dharmasraya menggantungkan hidupnya pada pertanian.

Sedangkan dalam Variabel pendidikan hal ini menjadi faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan wawasannya sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Dengan rendahnya daya kreativitas masyarakat maka akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup.

Tabel 4.4

Distribusi Persentase Punduduk Miskin di Kabupaten Dharmasraya Menurut Pendidikan yang ditamatkan

NO	Pendidikan	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	< SD	50,41	49,99	58,04	41,74
2	Tamat SD/SLTP	37,73	44,22	36,79	47,90
3	SLTA +	11,87	5,79	5,17	10,33
4	Total	100,00	100,00	100,0	100,00

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan (Berbagai Edisi)

Berdasarkan data BPS, dari seluruh rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya tercatat pada tahun 2005 sebanyak 88.12 persen penduduk miskin berpendidikan rendah (SLTP ke bawah), sedangkan penduduk miskin yang berpendidikan SLTA ke atas hanya tercatat sebanyak 11.87 persen. Pada tahun 2006

jumlah penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SLTP kebawah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 94.21 persen penduduk yang berpendidikan SLTP ke bawah, sisanya 5.79 persen yang berpendidikan SLTA ke atas. Dan pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SLTP kebawah mengalami peningkatan kembali menjadi 94.83 persen. Terakhir pada tahun 2008 penduduk miskin yang menamatkan pendidikan dibawah SLTP mengalami penurunan walaupun masih dengan persentase yang besar dimana jumlahnya menjadi 89.64% dan yang berpendidikan SLTA ke atas 10.33 persen.

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Rumah Tangga Miskin Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengantarkan manusia ke arah kedewasaan, karena dengan melalui pendidikan diharapkan masyarakat akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk membina kemampuan dalam rangka mencari penghidupan yang lebih layak. Selain itu, dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat juga dapat lebih baik dalam mengatur pola kehidupannya.

Seperti yang dikatakan **Mantra** (2000) yang menyebutkan bahwa pendidikan berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik, terampil, dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan dalam kaitannya denga penyiapan tenaga kerja harus selalu fleksibel dan berwawasan lingkungan agar pendidikan keterampilan dan keahlian dapat disesuaikan dengan kebutuhan terhadap jenis-jenis keterampilan dan keahlian profesi yang selalu berubah.

Tabel 5.1

Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga Tahun 2009

No	Kondisi Rumah Tangga	Pendidikan Kepala Rumah Tangga				Jumlah Rumah Tangga
		SLTP Kebawah		SLTA Keatas		
		RT	Persentase	RT	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Miskin	3.756	92,1%	323	7,9%	4.079
2	Tidak Miskin	28.585	72,7%	10.755	27,3%	39.340
Jumlah		32.341	74,5%	11. 078	25,5%	43.419

Sumber: Data Diolah dari Susenas 2009

Berdasarkan hasil Susenas 2009, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga cukup bervariasi antara kepala rumah tangga yang tidak/belum pernah sekolah sampai dengan kepala rumah tangga berpendidikan S-2 dan bahkan S-3. Namun, dalam penelitian ini pendidikan kepala rumah tangga hanya akan dibagi menjadi 2 kelompok yakni kepala rumah tangga berpendidikan rendah (pendidikan tertingginya SLTP kebawah) dan kepala rumah tangga berpendidikan tinggi (pendidikan tertingginya SLTA keatas).

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya kepala rumah tangga yang menamatkan pendidikan tertingginya SLTP kebawah tercatat sebanyak 74,5 persen dan yang menamatkan pendidikan SLTA keatas sebanyak 25,5 persen. Apabila pendidikan kepala rumah tangga dikaitkan dengan kondisi rumah tangga, tampak bahwa dari seluruh rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya yang

tercatat sebanyak 4.079 rumah tangga, sebanyak 92,1 persen kepala rumah tangganya berpendidikan rendah (tamat SLTP kebawah). Sementara itu, dari seluruh rumah tangga miskin dengan pendidikan kepala rumah tangganya menamatkan SLTA keatas hanya tercatat sebanyak 7,9 persen.

Dari informasi di atas, maka dapat dilihat bahwa pendidikan kepala rumah tangga cukup berhubungan positif dan erat dengan terbentuknya rumah tangga miskin. Untuk rumah tangga yang tidak miskin yang dicirikan dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan SLTA keatas tercatat sebanyak 27,3 persen dan sebesar 72,7 persen dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang hanya SLTP kebawah.

5.2 Rumah Tangga Miskin Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa jumlah anggota rumah tangga menjadi variabel yang turut diduga dapat menyebabkan kemiskinan. Bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga cukup besar tentu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya apabila tidak didukung dengan tingkat pendapatan yang memadai.

Dalam hal ini, variabel ukuran rumah tangga disajikan dalam 2 kategori yakni ukuran keluarga sebanyak 1- 4 orang dan ukuran keluarga sebanyak 5 orang atau lebih.

Tabel 5.2
Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Ukuran Rumah Tangga Tahun 2009

No	Kondisi Rumah Tangga	Ukuran Rumah Tangga				Jumlah Rumah Tangga
		5 orang ke atas		1 - 4 orang		
		RT	Persentase	RT	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Miskin	1.686	41,3%	2.393	58,7%	4.079
2	Tidak Miskin	14.539	37,0%	24.801	63,0%	39.340
Jumlah		16.225	37,4%	27.194	62,6%	43.419

Sumber: Data Diolah dari Susenas 2009

Berdasarkan hasil Susenas 2009, rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki jumlah anggota rumahtangga terdiri atas 5 orang atau lebih terdapat sebanyak 41,3 persen sedangkan sisanya yakni sebanyak 58,7 persen memiliki jumlah anggota rumahtangga hanya 1 sampai dengan 4 orang.

Sementara itu, pada kelompok rumah tangga yang tidak miskin terdapat sebanyak 37,0 persen adalah rumah tangga dengan jumlah anggota rumahtangga sebanyak 5 orang atau lebih, sedangkan rumah tangga dengan jumlah anggota rumahtangga 1 hingga 4 orang terdapat sebanyak 63,0 persen.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Dharmasraya jumlah anggota rumahtangga menjadi hal yang cukup penting dalam membahas rumah tangga miskin. Kesulitan yang dialami oleh sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya sebagai penyebabnya adalah masih banyaknya rumah tangga dengan jumlah anggota rumahtangga yang cukup besar yakni 5 orang

atau lebih. Apabila tingkat pendapatan rumah tangga relatif tidak berubah maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.3 Rumah Tangga Miskin Menurut Etos Kerja

Etos kerja kepala rumahtangga dalam penelitian ini menjadi salah satu variabel yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap terbentuknya rumahtangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah jam kerja perminggu melebihi dari jam kerja normal (35 jam perminggu) diharapkan akan dapat menghasil pendapatan masyarakat yang tinggi pula, sehingga dengan pendapatan yang tinggi paling tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Tabel 5.3
Persentase Kondisi Rumah Tangga Menurut Etos Kerja Tahun 2009

No	Kondisi Rumah Tangga	Etos Kerja (Jam Kerja perminggu)				Jumlah Rumah Tangga
		<35 jam		35 jam ke atas		
		RT	Persentase	RT	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Miskin	2.913	71,4%	1.166	28,6%	4.079
2	Tidak Miskin	20.086	51,1%	19.254	48,9%	39.340
Jumlah		22.999	53,0%	20.420	47,0%	43.419

Sumber: Data Diolah dari Susenas 2009

Berdasarkan hasil Susenas 2009, rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kepala rumahtangga dengan etos kerja rendah (bekerja kurang dari 35 jam perminggu) terdapat sebanyak 71,4 persen sedangkan sisanya

yakni sebanyak 28,6 persen adalah rumahtangga dengan etos kerja kepala rumahtangga yang tinggi (bekerja 35 jam ke atas perminggu).

Sementara itu, pada kelompok rumah tangga yang tidak miskin terdapat sebanyak 51,1 persen adalah rumah tangga dengan kepala rumahtangga yang memiliki etos kerja rendah, sedangkan rumah tangga dengan kepala rumahtangga yang memiliki etos kerja tinggi terdapat sebanyak 48,9 persen.

Dari temuan di atas dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Dharmasraya etos kerja kepala rumahtangga menjadi hal yang cukup penting dalam mengkaji rumah tangga miskin. Kebiasaan yang terjadi di sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya sebagai penyebabnya adalah masih banyaknya kepala rumah tangga dengan etos kerja rendah (bekerja kurang dari 35 jam perminggu). Apabila sifat pemalas ini masih tetap belum berubah maka akan sulit tingkat pendapatan rumah tangga dapat meningkat berubah maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.4. Rumah Tangga Miskin Menurut Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga

Status pekerjaan dalam penelitian ini dipresentasikan melalui pekerja informal dan pekerja formal dan diduga turut berpengaruh terhadap rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya. Semakin banyak pekerja informal dikhawatirkan akan semakin banyak rumah tangga dengan pendapatan yang rendah sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya akan semakin meningkat pula rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Dharmasraya.